



BUPATI KATINGAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN  
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG  
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI  
TAHUN 2023-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi agar berjalan secara efektif, efisien, terukur konsisten dan berkelanjutan, diperlukan sebuah *Road Map* Reformasi Birokrasi dalam kerangka perencanaan strategis tingkat daerah yang mendukung dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, Pemerintah Daerah perlu melakukan penyesuaian *Road Map* Reformasi Birokrasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

yl

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

11. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara *Online* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 591);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 77);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2023-2024.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Katingan Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma dan dengan upaya luar biasa.
6. *Road Map* Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat RMRB adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, sekaligus sebagai alat bantu bagi Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.
7. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi yang disusun dalam RMRB demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah daerah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Prioritas Reformasi Birokrasi;
- b. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan
- c. Monitoring dan evaluasi.

### BAB II

#### PRIORITAS REFORMASI BIROKRASI

#### Pasal 5

- (1) Prioritas reformasi birokrasi meliputi:
  - a. Pembenahan manajemen pemerintah daerah;
  - b. Pelaksanaan SPBE, kemiskinan dan investasi yang dicapai;
  - c. Peningkatan pelayanan;
  - d. Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani; dan
  - e. Perangkat daerah.
- (2) Prioritas pembenahan manajemen pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu fokus perubahan yang menjadi prioritas terkait dengan area perubahan reformasi birokrasi meliputi sumber daya manusia, pengawasan dan tatalaksana.
- (3) Prioritas pemeliharaan terhadap hal-hal yang telah dicapai dengan predikat baik atau sangat baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk tetap dipertahankan atau bahkan ditingkatkan.
- (4) Prioritas peningkatan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu prioritas yang terkait dengan pelayanan publik yang sangat menyentuh kehidupan masyarakat yakni pelayanan pada sektor-sektor strategis dan pelayanan yang dampaknya dapat memberikan citra positif terhadap reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah.
- (5) Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu penentuan unit kerja yang melaksanakan reformasi birokrasi secara menyeluruh sebagai contoh bagi unit kerja lainnya.
- (6) Prioritas perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yaitu fokus perubahan yang menjadi prioritas masing-masing perangkat daerah dan dapat pula dijadikan sebagai fokus perubahan bagi pemerintah daerah.

### BAB III

#### PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

#### Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan proses berkesinambungan dan berkelanjutan.
- (2) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu melakukan konsolidasi bersama dengan kelompok kerja guna melakukan pemantapan langkah dan strategi yang dilakukan sampai dengan tahun 2024.

- (3) Langkah-langkah yang disepakati oleh kelompok kerja dalam proses konsolidasi berisi program, kegiatan, agenda dan hasil Reformasi Birokrasi Tahun 2023-2024.

Pasal 7

- (1) RMRB Tahun 2023-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2023-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

RMRB Tahun 2023-2024 digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun dan mengevaluasi pelaksanaan program, kebijakan dan kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 9

RMRB dapat dilakukan perubahan menyesuaikan dengan dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan 31 Desember 2024.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan

pada tanggal 20 Februari 2024

Pj. BUPATI KATINGAN,



SAIFUL

Diundangkan di Kasongan

pada tanggal 20 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KATINGAN,



PRANSANG

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2024 NOMOR 78

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI KATINGAN  
NOMOR 7 TAHUN 2024  
TENTANG  
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI  
TAHUN 2023-2024

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah merujuk pada kebijakan Grand Design Reformasi Birokrasi (RB) 2010-2025 yang telah memasuki periode *Road Map* ketiga (akhir). Hasil evaluasi atas pelaksanaan RB secara nasional masih menunjukkan adanya kesenjangan antara kondisi capaian terkini dengan kondisi yang diharapkan pada akhir tahun 2025. Kesenjangan tersebut dapat dilihat dari dua sisi, yaitu pada perencanaan dan pelaksanaan. Pada aspek perencanaan, Road Map RB 2020-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020, belum optimal mengakselerasi tata kelola pemerintahan yang mendorong percepatan pencapaian pembangunan nasional maupun daya saing global. Pada aspek pelaksanaan, hasil pengelolaan RB di level nasional maupun instansional belum secara optimal dapat dirasakan masyarakat, karena belum sepenuhnya fokus pada hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*). Sehubungan dengan kondisi tersebut, telah dilakukan penajaman Road Map RB 2020-2024 melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Dengan adanya perubahan kebijakan tersebut maka Pemerintah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah melakukan penyesuaian kebijakan reformasi birokrasi 2021-2024 sebagaimana perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Nasional 2020-2024. Perubahan ini dilakukan dengan melakukan penajaman terhadap tujuan, sasaran dan indikator. Selain itu juga dilakukan penajaman terhadap fokus pelaksanaan reformasi birokrasi yakni pada masalah-masalah tata kelola pemerintah yang terjadi di internal yang kemudian disebut dengan RB General dan fokus terhadap masalah yang muncul di masyarakat yang disebut dengan RB Tematik.

BAB I  
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan sebuah kebutuhan di tengah dinamika kompleksitas global yang menyebabkan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui RB yang berkualitas pada akhirnya adalah untuk mempercepat tercapainya Pembangunan Nasional dan Daerah. Dengan kata lain, RB merupakan sebuah instrumen alat (*tools*) dalam rangka percepatan pencapaian prioritas kerja Presiden, pembangunan nasional dan pembangunan daerah.

RB menjadi salah satu dari lima agenda prioritas Pembangunan Nasional yang menjadi fokus dari pemerintahan. Arahan Presiden tentang RB berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (*making delivered*), serta birokrasi yang lincah dan cepat (*agile bureaucracy*). Arahan Presiden tersebut dapat terwujud apabila ada upaya perbaikan dalam tata kelola pemerintahan yang menyentuh akar permasalahan, tidak hanya menjadi agenda rutin tanpa memberikan daya ungkit yang konkret.

Dalam rangka memastikan pengelolaan RB yang efektif, Pemerintah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah telah merujuk pada kebijakan nasional yang telah ditetapkan. Kebijakan tersebut yakni Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Pada akhir periode Grand Design RB, upaya reformasi diharapkan telah menghasilkan birokrasi yang berkelas dunia.

Semakin berkualitas tata kelola pemerintahan (*governance*), semakin baik pula hasil pembangunan (*development outcomes*). Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pembangunan nyata yang manfaatnya dirasakan oleh masyarakat seperti pro pengurangan kemiskinan, pro lapangan pekerjaan, dan berbagai hasil nyata yang bermuara pada kesejahteraan rakyat. Namun, walaupun pelaksanaan RB telah memasuki periode *Road Map* terakhir *Grand Design* RB Tahun 2010-2025, hasil yang ditunjukkan masih belum optimal. Beberapa upaya RB masih berfokus pada proses dan belum sepenuhnya berfokus pada manfaat yang secara langsung dirasakan masyarakat.

Oleh karenanya pemerintah melakukan penajaman terhadap Road Map RB 2020-2024 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Dengan kondisi tersebut maka Pemerintah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah melakukan penyesuaian terhadap Road Map Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2024. Secara khusus, aspek utama penajaman dari Road Map RB Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Isu strategis dan capaian RB maupun capaian pembangunan instansional (mikro)
- 2) Tujuan dan sasaran strategis RB Instansional (mikro)
- 3) Kegiatan utama RB General termasuk target tahunan
- 4) Tema RB Tematik termasuk target kinerja, serta
- 5) Manajemen/Pengelolaan RB Instansional (mikro).

## B. TUJUAN PENAJAMAN ROAD MAP RB

Pada hakikatnya, Road Map RB harus mampu menjabarkan visi, misi, dan prioritas pembangunan nasional dan mampu menjawab isu strategis dalam tata kelola pemerintahan yang menghambat pencapaian kebijakan prioritas nasional. Mengacu pada beberapa permasalahan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka perlu dilakukan penajaman terhadap Road Map RB Nasional Tahun 2020-2024 dengan tujuan, yaitu:

- 1) Mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran strategis RB

Penajaman Road Map RB 2020-2024 bertujuan untuk mengakselerasi pelaksanaan RB sehingga tujuan dan sasaran strategis RB dapat dirasakan secara signifikan oleh masyarakat. Capaian RB pada dua periode Road Map RB 2020-2024 sebelum penajaman menunjukkan bahwa upaya perbaikan tata kelola telah meningkat di pemerintah daerah, namun upaya tersebut belum signifikan dirasakan oleh masyarakat dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berkelas dunia. Selama ini pelaksanaan RB masih berfokus pada upaya untuk melakukan perbaikan internal masing-masing pemerintah daerah, selain itu Road Map RB 2020-2024 sebelum penajaman disusun sebelum munculnya pandemi dan belum mengakomodir tujuan utama Road Map pada Grand Design. Melalui penajaman Road Map RB 2020-2024 ini, dapat fokus pada perbaikan internal serta berdampak untuk mengungkit pencapaian agenda Pembangunan Nasional.



- 2) Mendapatkan Road Map RB yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan.

Penajaman bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, adaptif serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan RB tidak hanya berfokus pada menyelesaikan permasalahan umum dalam tata kelola pemerintahan, namun juga untuk merespon permasalahan yang nyata terjadi di lapangan. Berbagai perubahan lingkungan strategis dalam skala nasional maupun global juga harus menjadi dasar dalam menetapkan arah kebijakan RB. Kebijakan RB perlu disesuaikan dengan kebutuhan birokrasi menghadapi kondisi lingkungan yang disruptif, tidak terprediksi, tidak menentu dan berpengaruh terhadap tatanan kehidupan masyarakat.

- 3) Mendapatkan Road Map RB yang mampu menciptakan integrasi dan orkestrasi pelaksanaan RB yang sinergis dalam pemerintahan.

Penajaman Road Map RB 2020-2024 dilakukan untuk mengurangi silo (*fragmented*) antar instansi pemerintah. Pelaksanaan RB memerlukan kolaborasi yang baik dari seluruh pihak yang terkait, baik dari unsur pemerintah maupun luar pemerintah. Kementerian / lembaga yang menjadi koordinator pengampu (*leading institution*) pelaksanaan RB juga perlu didorong untuk mewujudkan ukuran-ukuran yang lebih logis, holistik, berorientasi hasil serta tidak duplikasi. Berkaitan dengan hal tersebut, melalui penajaman Road Map RB 2020-2024, seluruh instansi pemerintah diharapkan dapat meningkatkan sinergitas untuk mendorong pencapaian tujuan pembangunan nasional.

## BAB II

### GAMBARAN BIROKRASI KABUPATEN KATINGAN

Reformasi Birokrasi menghadapi beberapa permasalahan, tantangan, dan peluang pada tingkat hulu maupun hilir yang harus segera direspon serta diantisipasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dicita-citakan pada Tahun 2023. Isu-isu strategis tersebut akan mempengaruhi konstruksi penajaman Road Map RB.

#### A. ISU STRATEGIS DI TINGKAT HULU

Isu strategis tingkat hulu merupakan masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang bersumber pada tata kelola pemerintahan. Isu strategis tingkat hulu umumnya akan menimbulkan potensi masalah lain, jika tidak segera ditangani. Beberapa isu tingkat hulu yang berkaitan dengan pelaksanaan RB adalah sebagai berikut:

##### 1) Birokrasi yang Belum Kolaboratif

Sejalan dengan arahan Presiden, bahwa birokrasi harus berorientasi hasil. Untuk mewujudkan arahan tersebut, terdapat berbagai peran aktor dan sektor yang menjadi kunci keberhasilan RB. Namun dalam praktiknya, peran yang silo masih menjadi tantangan dalam perencanaan dan pelaksanaan, maupun pengukuran RB. Oleh karena itu untuk meningkatkan efektivitas peran-peran tersebut diperlukan kolaborasi dan integrasi dalam rumusan tujuan, sasaran (*goal setting*) dan strategi pelaksanaan RB.

##### 2) Transformasi Digital yang Belum Optimal

Dalam mewujudkan transformasi digital yang mendukung kinerja birokrasi, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Namun saat ini implementasi SPBE di Pemerintah Kabupaten Katingan belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini disebabkan, masih kurangnya perhatian terhadap transformasi digital sebagai prioritas. Oleh karena itu diperlukan penguatan dan percepatan implementasi SPBE secara berkelanjutan.

3) Penyederhanaan Struktur dan Mekanisme Kerja Baru yang belum tuntas

Penyederhanaan birokrasi merupakan serangkaian proses yang terdiri dari penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi. Penyesuaian sistem kerja pada instansi pemerintah dilakukan secara mendasar yang mampu mentransformasi proses bisnis pemerintahan menjadi lebih dinamis, lincah, dan profesional. Sistem kerja yang sebelumnya bersifat berjenjang/hierarkis menjadi sistem kerja yang sederhana dengan mengedepankan pada kerja tim yang fokus pada hasil serta menghargai kompetensi, keahlian, dan keterampilan dengan dukungan tata kelola pemerintahan berbasis digital, untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Sebagai pedoman untuk pelaksanaan sistem kerja tersebut, Menteri PANRB telah menetapkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri ini, seluruh instansi pemerintah diminta untuk segera menyesuaikan sistem kerjanya melalui penyempurnaan mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi yang berorientasi pada percepatan pengambilan keputusan dan perbaikan pelayanan publik, dengan optimalisasi SPBE.

Melalui Sistem Kerja yang baru, Pejabat Fungsional akan dapat ditugaskan secara *flexible, changeable, dan moveable*, dengan pengelolaan kinerja yang akuntabel. Pegawai ASN tidak bekerja dalam kotak-kotak tertentu melainkan fokus pada pencapaian tujuan organisasi. Dengan mekanisme kerja tersebut, Pegawai ASN dituntut untuk mampu berkinerja lebih optimal sesuai dengan kompetensinya, dapat dimanfaatkan tidak hanya pada unit organisasi, namun juga dapat dimanfaatkan di luar unit organisasi.

4) Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan yang masih menghadapi kendala

Integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan masih menghadapi banyak tantangan. Hal ini terlihat dari hasil/laporan survei penilaian integritas yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kelemahan sistem pengawasan mendorong terjadinya perilaku koruptif dan pelanggaran integritas. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan sistem pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

5) Budaya Birokrasi: BerAKHLAK yang belum terimplementasi dengan baik

BerAKHLAK yang ditetapkan sebagai budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyederhanakan nilai-nilai dasar ASN yang terkandung dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang terdiri atas komponen Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif serta budaya integritas tinggi dan pelayanan prima. Sehingga budaya kerja tersebut dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi setiap ASN dalam berperilaku menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga dapat dijadikan pengungkit. Meskipun budaya kerja ini sudah disosialisasikan kepada seluruh pemerintah daerah, namun belum diinternalisasi dengan baik, sehingga pemahaman makna nilai BerAKHLAK belum merata pada ASN. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan dalam internalisasi nilai BerAKHLAK secara masif dan berkelanjutan.

## B. ISU STRATEGIS DI TINGKAT HILIR

Isu strategis tingkat hilir merupakan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program Pembangunan Nasional. Isu strategis hilir umumnya terjadi sebagai turunan yang muncul apabila isu strategis hulu tidak diselesaikan. Beberapa isu strategis hilir yang berkaitan dengan pelaksanaan RB adalah sebagai berikut:

- 1) Hasil pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan belum sebanding dengan sumber daya yang dikeluarkan.

Pemerintah telah mengerahkan sumber daya anggaran yang cukup besar untuk melaksanakan berbagai program pengentasan kemiskinan dengan anggaran yang cukup besar. Namun dengan anggaran tersebut, belum mampu menurunkan angka kemiskinan yang mengalami peningkatan dalam 3 tahun terakhir (2020-2022).

Selain sumber daya anggaran yang besar, program pembangunan juga melibatkan berbagai sektor pemerintahan yang memiliki potensi keterkaitan berdasarkan target output dan lokus kegiatannya. Namun, belum terdapat kolaborasi utuh dalam langkah strategis yang utuh. Di lain sisi, kualitas tata kelola lintas instansi belum sejalan dengan capaian RB dan akuntabilitas instansi yang cenderung sudah baik.

- 2) Tantangan resesi global dan pentingnya investasi

Resesi global membawa potensi yang mengarah pada krisis pangan, energi, dan keuangan menyebabkan semua negara membutuhkan investasi. Peningkatan investasi daerah sangat dipengaruhi iklim investasi yang kondusif. Oleh karena itu upaya pengembangan iklim investasi yang kondusif ini menjadi salah satu fokus perhatian. Oleh karena itu, ruang lingkup peningkatan investasi diantaranya penyusunan regulasi/kebijakan, pemetaan potensi, dan kemitraan.

- 3) Tantangan perubahan global dan tuntutan terhadap pelayanan publik

Perubahan lingkungan global yang tidak terprediksi dan berciri VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*) menuntut seluruh sektor, termasuk birokrasi, agar dapat bekerja secara *agile, adaptive*, dan cepat, terutama dalam hal digitalisasi. Di lain sisi, masyarakat juga menuntut adanya kecepatan dan kemudahan pelayanan publik. Oleh sebab itu, RB diarahkan untuk mendorong terciptanya kepatuhan terhadap standar pelayanan dan digitalisasi administrasi pemerintah agar dapat mendukung pelayanan publik yang lebih cepat dan mudah.

- 4) Dampak inflasi yang tidak terkendali

Inflasi menjadi perhatian utama pemerintah dalam menjaga kondisi ekonomi. Inflasi yang tidak terkendali akan menyebabkan dampak negatif seperti naiknya harga-harga, menurunnya daya beli masyarakat, dan peningkatan suku bunga. Dampak jangka panjang dari inflasi adalah adanya potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga menyebabkan peningkatan pengangguran yang berpotensi pada peningkatan angka kemiskinan. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memprioritaskan untuk menyelamatkan masyarakat agar tidak banyak yang jatuh ke jurang kemiskinan akibat dari adanya kenaikan harga.

### C. CAPAIAN REFORMASI BIROKRASI SAMPAI SAAT INI

Pelaksanaan RB Pemerintah Kabupaten Katingan telah memasuki periode akhir Road Map RB sejak Grand Design RB Tahun 2010-2025 diterbitkan. Berbagai perbaikan telah dilakukan dalam tata kelola pemerintahan, mulai dari penyederhanaan birokrasi, penyetaraan jabatan, pengembangan arsitektur SPBE nasional yang terintegrasi, efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sampai dengan penguatan pelayanan publik. Semua upaya tersebut bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang berkelas dunia sebagai tujuan akhir dari Grand Design RB Tahun 2010-2025. Beberapa capaian dari pelaksanaan RB sampai akhir tahun 2022 adalah sebagai berikut:

#### 1) Penyederhanaan Birokrasi Dua Level

Pemerintah Kabupaten Katingan telah melantik sebanyak 205 Pejabat Fungsional hasil penyetaraan dari Jabatan Administrasi pada 31 Desember 2021 dan melantik sebanyak 26 Pejabat Fungsional hasil penyetaraan dari Jabatan Administrasi pada 27 Mei 2022, sehingga total seluruh Pejabat Administrasi yang disetarakan. Jabatan Fungsional sebanyak 231 Pejabat dari 233 jabatan yang disetujui untuk disederhanakan dan terdapat selisih 2 Pejabat dengan keterangan 1 orang mutasi dan 1 orang pensiun.

#### 2) Digitalisasi Birokrasi Melalui Penerapan SPBE yang Terintegrasi

Pemerintah Kabupaten Katingan berupaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan SPBE guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Untuk mencapai hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Katingan telah melaksanakan hal berikut :

1. Menyusun regulasi terkait SPBE yaitu Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2019 tentang SPBE dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. Pemerintah Kabupaten Katingan telah menyusun Keputusan Bupati terkait arsitektur SPBE yaitu Keputusan Bupati nomor 555/339 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun 2022-2023. Penyusunan Arsitektur SPBE Kabupaten Katingan menggunakan Sistem Informasi Arsitektur SPBE sebagai kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi. Selain itu, untuk mempermudah pertukaran layanan SPBE, Pemerintah Kabupaten Katingan juga telah menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah yang telah disediakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
3. Menyusun Keputusan Bupati Nomor 555/309 Tahun 2023 tentang Peta Rencana SPBE tahun 2023-2024 agar pencapaian implementasi SPBE terintegrasi dapat terarah dan terkendali;
4. Mengimplementasi aplikasi umum serta mengutamakan penggunaan aplikasi berbagi pakai dari Pemerintah Pusat; dan
5. Melakukan pembangunan/pengembangan aplikasi layanan administrasi pemerintahan dan aplikasi layanan publik serta mengimplemetasi sertifikat elektronik.

Hasil evaluasi SPBE Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun 2022 memperoleh nilai 2,25 atau tingkat kematangan SPBE "Cukup"

3) Efisiensi APBD Melalui Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

SAKIP merupakan manajemen kinerja sektor publik yang memadukan dan mengintegrasikan sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja sehingga memastikan keselarasan dalam rangka pencapaian kinerja Instansi Pemerintah. SAKIP berhasil menyelaraskan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tingkat pemerintah daerah hingga organisasi dan individu serta perbaikan terhadap ukuran kinerja yang berorientasi *outcome*. Hasil Evaluasi AKIP Pemerintah Kabupaten Katingan mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 memperoleh nilai 57,27 atau predikat "CC", sedangkan pada tahun 2022 memperoleh nilai 61,16 dengan predikat "B".

4) Penguatan Pengawasan Melalui pembangunan Zona Integritas

Pembangunan ZI di Kabupaten Katingan hanya sebatas langkah pengenalan dalam rapat rencana dan evaluasi RB. Sebagaimana surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/ 23/PW.00/2023 tanggal 15 Maret 2023, Hal : petunjuk teknis pengusulan unit kerja Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM Tahun 2023 dijelaskan bahwa selain opini WTP ada 1 hal yg masih terkendala yaitu hasil penilaian maturitas SPIP minimal level 3 oleh BPKP, sedangkan Pemerintah Kabupaten belum mencapai level 3 yaitu masih di level 2 dengan nilai 2,979.

Penguatan Pengawasan Pemerintah Kabupaten Katingan dilaksanakan dengan Peningkatan Maturitas SPIP. Unit-Unit Kerja di lingkup pemerintah Kabupaten Katingan rata-rata memiliki kemampuan memetakan risiko/ membuat risk register dalam pelaksanaan rencana kerja yang sesuai tugas dan fungsinya dimana hal ini menjadi sebuah alat strategi tercapainya sasaran dan tujuan jangka pendek. Hal ini menunjukkan peningkatan dalam maturitas SPIP yaitu pengelolaan sistem pengendalian intern yang baik menunjukkan kemampuan tata kelola pemerintahan yang baik sehingga sistem yang berjalan di unit-unit kerja sesuai mekanisme yang diharapkan yang tidak terletak kepada kemampuan personil/individu di unit kerja melainkan sistem itu sendiri.

5) Peningkatan kualitas pelayanan publik

Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan memiliki komitmen untuk terus berbenah dan meningkatkan mutu pelayanan publik. Berdasarkan hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan mendapatkan nilai indeks sebesar 2,53 dengan kategori C (Cukup). Nilai ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Demikian juga dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang memperoleh nilai 2,98 dengan kategori C (Cukup) juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

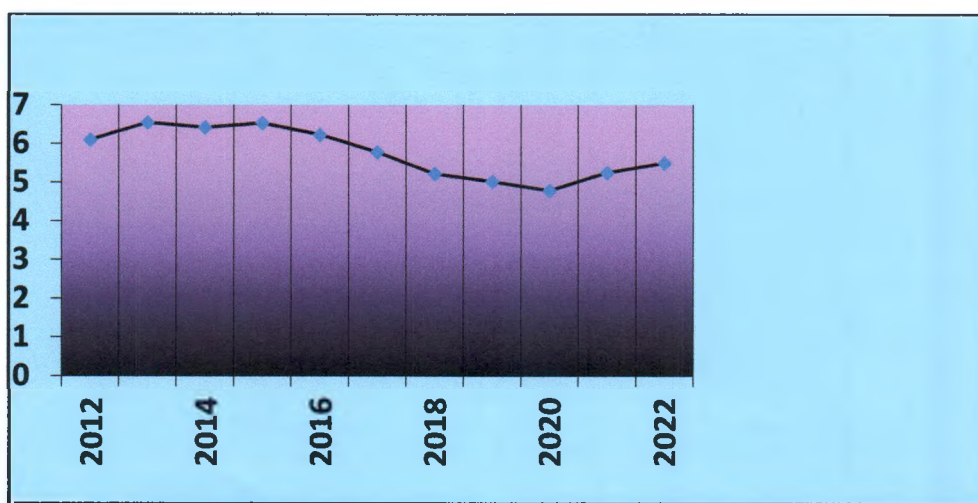
Selain itu, progres capaian RB juga dapat dilihat melalui Indeks RB. Indeks RB Pemerintah Kabupaten Katingan mengalami peningkatan. Tahun 2021 memperoleh indeks RB sebesar 48,88 dengan kategori C sedangkan pada Tahun 2022 memperoleh indeks RB sebesar 53,44 dengan kategori CC.

Berkaitan dengan capaian pembangunan daerah, pelaksanaan RB juga belum mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah utama yang terjadi pada masyarakat, seperti: pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, serta isu-isu strategis lainnya. Berdasarkan data dari BPS, persentase angka kemiskinan di Kabupaten Katingan dengan mengacu pada gambar di bawah,

Tabel 2.1. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Katingan 2012-2022

Tahun Year	Garis Kemiskinan (Rp) Poverty Line	Jumlah Penduduk Miskin (ribu) Number of Poor People (thousand)	Persentase Penduduk Miskin Percentage of Poor People
(1)	(2)	(3)	(4)
2012	299 427	9,34	6,1
2013	325 773	10,2	6,55
2014	341 896	10,16	6,42
2015	356 695	10,41	6,53
2016	387 848	10,1	6,23
2017	412 113	9,51	5,78
2018	420 418	8,73	5,22
2019	434 609	8,51	5,02
2020	474 056	8,23	4,79
2021	498 487	9,15	5,25
2022	553 082	9,71	5,5

Gambar 2.1 Grafik penduduk miskin di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah  
Sumber: BPS



Angka investasi dalam aspek Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) mengalami peningkatan dalam kurun dua tahun terakhir (2021 s.d. 2022) namun, belum signifikan. Sehingga perlu dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik lagi. Berikut realisasi investasi di Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan.

Tabel 2.2. Realisasi investasi di Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2017-2022

Tahun	Tambahannya realisasi investasi	
	PMA	PMDN
2017	1.219.881.974.652,41	1.124.980.148.645,00
2018	1.875.572.532.132,41	848.775.526.019,00
2019	1.852.401.015.342,41	3.790.278.623.286,00
2020	2.171.948.678.654,34	4.171.745.209.352,80
2021	2.118.845.977.565,74	4.994.118.522.073,36
2022	2.155.443.287.565,74	5.182.234.522.073,36

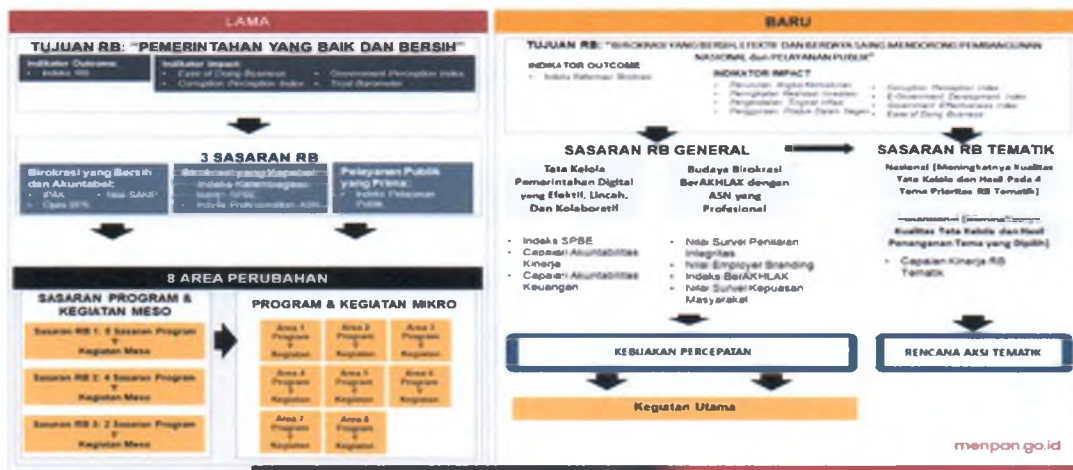
Selain angka kemiskinan dan angka investasi, Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan juga melaksanakan percepatan prioritas aktual Presiden yakni peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

### BAB III AGENDA REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN KATINGAN

#### I. PENETAPAN TUJUAN, SASARAN, DAN INDIKATOR REFORMASI BIROKRASI

Secara umum, tujuan dan sasaran akan diarahkan untuk menjawab isu tata Kelola pemerintahan yang belum berkontribusi signifikan dalam capaian Pembangunan. Strategi yang akan digunakan untuk menjawab isu strategis yang ada adalah dengan mendorong terciptanya birokrasi digital yang lincah, kolaboratif dan akuntabel, didukung dengan budaya birokrasi yang berorientasi kinerja dan pelayanan, serta individu ASN yang lebih profesional.

Gambaran fokus penajaman tujuan, sasaran, dan indikator dalam *Road Map* RB 2019-2023 setelah penajaman dibandingkan dengan *Road Map* RB 2019-2023 sebelum penajaman diilustrasikan dalam gambar 3.1 berikut:



Gambar 3.1. Perbandingan Kerangka Pelaksanaan RB  
Sumber: Kementerian PANRB

#### A. Tujuan RB

Tujuan yang terdapat pada *Road Map* RB 2019-2023 sebelum penajaman adalah “Pemerintahan yang baik dan bersih”, sedangkan tujuan dari *Road Map* RB 2019-2023 setelah penajaman adalah “Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik”. Tujuan RB harus diarahkan untuk dapat menjawab isu utama RB yang berkembang beberapa tahun terakhir.

Isu tersebut adalah terkait dampak dan kontribusi RB pada pembangunan daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, penciptaan pemerintah yang bersih dan bebas KKN.

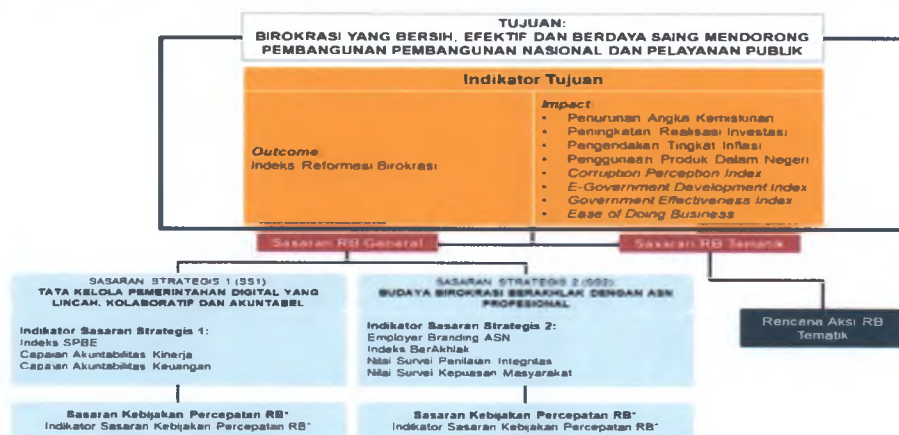
#### B. Sasaran Strategis RB

Berkaitan dengan sasaran, pada *Road Map* RB 2019-2023 sebelum penajaman terdapat tiga sasaran strategis RB, yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima. Pada *Road Map* RB 2019-2023 setelah penajaman, sasaran strategis RB disederhanakan menjadi dua aspek yaitu, aspek *hard element* adalah bagian dari kerangka logis RB yang merupakan berbagai perangkat yang terkait dengan akuntabilitas, kelembagaan, tatalaksana, cara kerja, strategi, serta sistem dan regulasi dalam pemerintahan dan aspek *soft*

*element* berbagai perangkat yang terkait dengan budaya dan sumber daya manusia. Adapun sasaran strategis RB adalah sebagai berikut.

- 1) Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif sebagai aspek *hard element*. Sasaran ini berkaitan dengan tata kelola pemerintahan (*governance*) yang mampu mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya melalui penciptaan hasil/dampak yang nyata bagi masyarakat dan pembangunan nasional, dengan kemampuan untuk selalu bersinergi dan cepat beradaptasi dalam merespon perubahan lingkungan strategis yang berciri VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*). Strategi utama untuk menciptakan tata kelola pemerintahan ini adalah dengan menjadikan teknologi informasi dan komunikasi sebagai instrumen utama dalam proses internal tata kelola pemerintah yang baik dan penyediaan pelayanan publik yang berkualitas.
- 2) Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional sebagai aspek *soft element*. Sasaran ini berkaitan dengan budaya birokrasi yang mengedepankan nilai orientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, kompeten, loyal, adaptif dan kolaboratif dalam pelaksanaan tugas menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas dan mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional, serta diisi dengan ASN yang memiliki komitmen, kemampuan, motivasi, perilaku, kinerja dan daya saing yang tinggi.

Penajaman terhadap ukuran keberhasilan atau indikator RB dilakukan dengan menetapkan ukuran keberhasilan yang relevan untuk menggambarkan tujuan dan sasaran strategis RB serta menyinergikan beberapa indikator. Oleh karenanya perlu dibangun kerangka logis indikator kinerja RB dengan mengacu pada kerangka logis hasil RB, yang meliputi: Tujuan, Sasaran strategis, Sasaran kebijakan, dan keluaran (*output*) kegiatan utama dari pelaksanaan RB. Kerangka logis indikator kinerja RB setelah dilakukan penajaman dapat dilihat pada Gambar 3.2, sedangkan definisi operasional masing-masing indikator dapat dilihat pada Lampiran Kamus Indikator.



Gambar 3.2. Kerangka Logis Indikator kinerja setelah Penajaman  
Sumber: Kementerian PANRB

### C. Target Kinerja Reformasi Birokrasi

Kinerja Pelaksanaan RB dicerminkan dengan pencapaian target kinerja sesuai dengan jenjang kinerja. Penjenjangan kinerja pelaksanaan RB sebagaimana telah dijelaskan dalam kerangka logis kinerja dan indikator kinerja RB pada gambar 3.1 dan 3.2, yaitu pada tingkat tujuan, sasaran strategis, sasaran kebijakan dan output kegiatan. Target kinerja pada tingkat pencapaian tujuan dan sasaran strategis RB sampai tahun 2023 dinyatakan dalam tabel berikut:



Tabel 3.1. Target Kinerja Tujuan RB Tahun 2023

No	Tujuan RB 2019-2023	Indikator Tujuan	Tingkat Nasional		Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah		Tingkat Kabupaten Katingan	
			Base line	Target 2024	Baseline	Target 2023	Base line	Target 2023
1.	Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik	Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Kategori B (Baik)	Kategori BB (Baik)	62,29 Kategori B (Cukup baik)	Kategori BB (Baik) (sesuai target RPJMD)	53,44 Kategori CC	Kategori BB (Baik) (sesuai target RPJMD)
		Capaian Indikator Kinerja Pembangunan (Angka Kemiskinan, Pertumbuhan Investasi)	Angka Kemiskinan 9,71 (Sep 2021)	Menurun	Angka Kemiskinan: 5,22%	Angka Kemiskinan: 3,5% (sesuai target RPJMD)	Angka Kemiskinan: 5,50%	Angka Kemiskinan: 4,95% (sesuai target RPJMD)
			Pertumbuhan Investasi= 9,0% (2021/2020)	Meningkat	Pertumbuhan Investasi = 6,23 (2021/2022)	Pertumbuhan Investasi = 4,01% (sesuai target RPJMD)	Pertumbuhan Investasi (PMA & PMDN) = 12,5% (sesuai target RPJMD)	Pertumbuhan Investasi (PMA & PMDN) = 3,16
		Realisasi Penanaman Modal 2021: 901,0	Meningkat	Realisasi Penanaman Modal 2022: 65,20	Realisasi Penanaman Modal 2023: harus meningkat			

Sumber: Kementerian PANRB

Tabel 3.2. Target Kinerja Sasaran Strategis RB Tahun 2023

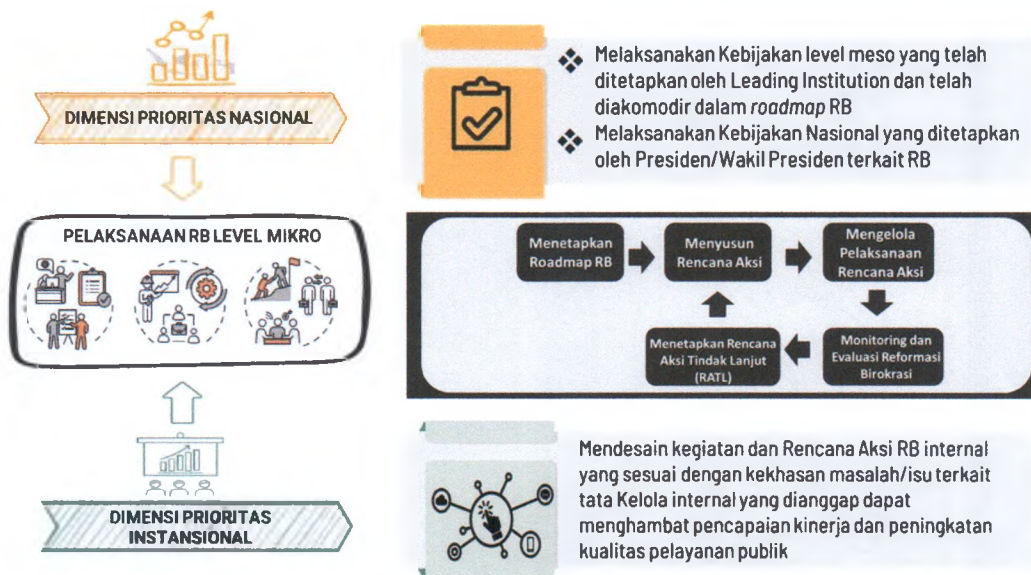
No.	Sasaran Strategis RB 2020-2024	Indikator Sasaran Strategis	Tingkat Nasional		Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah		Tingkat Kabupaten Katingan	
			Base line	Target 2024	Base line	Target 2024	Base line	Target 2024
1.	Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel	Indeks SPBE (sumber: Kementerian PANRB)	Predikat Baik	Predikat Baik	1,9 Predikat Cukup	2,75 Predikat Baik (sesuai target RPJMD)	Predikat Cukup	2,75 Predikat Cukup
		Capaian Akuntabilitas Kinerja (sumber: Kementerian PANRB)	Kategori Baik	Kategori Baik	62,84 Kategori Baik (B)	71,00 Kategori Sangat Baik (BB) (sesuai target RPJMD)	61,16 Kategori Baik (B)	67,00 Kategori Sangat Baik (B)
		Capaian Akuntabilitas Keuangan (sumber: BPK)	WTP	WTP dengan tindak lanjut 80%	WTP	WTP dengan tindak lanjut 80%	WTP	WTP
2.	Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional	Nilai Indeks Implementasi BerAKHLAK (sumber: Kementerian PANRB)	60,9 Kategori B (Cukup Sehat)	67,14 Kategori B (Cukup Sehat)	59,5% Kategori B (Cukup Sehat)	75% Kategori B (Sehat)	56,7% Kategori B (Cukup Sehat)	75% Kategori B (Sehat)
		Nilai Survei Penilaian Integritas (sumber: KPK)	71,4%	Meningkat	62,15	72,00	69,49	75,00
		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (sumber:Kementerian PANRB)	74,89	Meningkat	Semester II 2022: 84,97 (Kategori Mutu Baik)	86,20 (Kategori Mutu Baik)	B	BB

### A) PENETAPAN RB GENERAL

Secara umum pelaksanaan RB General mencakup implementasi kebijakan/program RB yang telah ditetapkan pada tingkat nasional di masing-masing pemerintah daerah serta program inovasi RB yang diperlukan masing-masing pemerintah daerah untuk mengakselerasi capaian tujuan dan sasaran strategis RB. Pelaksanaan RB pada level mikro/pemerintah daerah harus didasari pada dua dimensi, yaitu dimensi Prioritas Nasional dan dimensi Prioritas Instansional.

Pelaksanaan RB level mikro yang didasari Prioritas Nasional berarti pelaksanaan RB mikro harus sesuai dan selaras dengan seluruh kebijakan nasional terkait RB yang telah ditetapkan dalam kebijakan di level makro dan meso yang bersifat *mandatory*. Sedangkan pelaksanaan yang didasari pada dimensi Prioritas Instansional adalah pelaksanaan RB untuk mengakomodir kebutuhan untuk pemecahan masalah tata kelola internal pemerintah daerah yang masih menjadi kendala dalam penyediaan pelayanan publik yang berkualitas dan peningkatan kinerja yang berkelanjutan. Strategi pelaksanaan RB level mikro akan dimonitor dan dievaluasi serta menjadi bagian dari evaluasi RB. Pelaksanaan RB level mikro dapat diilustrasikan dalam gambar berikut:

Gambar 3.3. Pelaksanaan RB Level Mikro



Sumber: Kementerian PANRB

Pada Road Map RB 2020-2024 sebelum penajaman, kegiatan yang dilakukan diarahkan pada perbaikan berbagai aspek pemerintahan yang dikenal dengan delapan area perubahan. Delapan area perubahan ini meliputi Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Pada Road Map RB 2020-2024 setelah penajaman, kegiatan RB tidak akan dikaitkan dengan delapan area perubahan melainkan akan berfokus pada pelaksanaan Kegiatan Percepatan (*acceleration*). Kegiatan percepatan tersebut disusun berdasarkan sasaran strategis RB general yang selanjutnya menjadi kegiatan utama. Berikut kegiatan utama RB Kabupaten Katingan tahun 2023-2024.

93

Tabel 3.3. Kegiatan Utama RB Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun 2023-2024

Sasaran ( <i>immediate Outcome</i> )		Kegiatan Utama
SS.1: Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel		
SS.1.1	Terimplementasikannya Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi	Penyerderhanaan Birokrasi (Penyerderhanaan Struktur Organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan <i>agile</i>
SS.1.2	Terimplementasikannya kebijakan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN dengan Baik	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN
SS.1.3	Terimplementasikannya Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional
SS.1.4	Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Informasi Kinerja yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi
SS.1.5	Terbangunnya Pelayanan Publik Digital ( <i>Digital Services</i> )	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital
SS.1.6	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja
		Penguatan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
		Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
		Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi
SS.1.7	Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Regulasi	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik
		Pelaksanaan Pembuatan Peraturan Perundangan-undangan
SS.1.8	Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip digital dan data statistik sektoral	Pelaksanaan Arsip Digital
		Pelaksanaan Data Statistik Sektoral
SS.1.9	Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengelolaan keuangan dan aset	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
		Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

SS.2: Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Professional		
SS.2.1	Terwujudnya percepatan transformasi jabatan fungsional	Penataan Jabatan Fungsional
SS.2.2	Terselenggaranya manajemen talenta ASN yang efektif dan efisien	Penguatan Manajemen Talenta ASN
SS.2.3	Terwujudnya sistem kesejahteraan ASN yang adil, layak dan berbasis kinerja	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN
SS.2.4	Meningkatnya kepatuhan terhadap sistem merit dan sistem manajemen ASN	Penguatan Sistem Merit
		Pelaksanaan <i>Core Values</i> ASN
		Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima

Sasaran strategis sebagaimana tabel 3.3 diatas akan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan (pedoman dan petunjuk pelaksanaan) kegiatan utama yang diberikan pada RB level makro dan meso. Sehingga sasaran strategis yang belum memiliki pedoman dan petunjuk pelaksanaan akan diimplementasikan sesuai dengan ketentuan yang diberikan kemudian sebagaimana RB level makro dan meso. Pelaksanaan sasaran strategis yang bersifat *mandatory* akan diimplementasikan oleh perangkat daerah koordinator yang ditunjuk dan dilaksanakan pada seluruh perangkat daerah.

Sebagai langkah konkrit dari pelaksanaan kegiatan utama RB general di atas maka perlu ditetapkan target dari setiap kegiatan utama. Penetapan target ini disusun dengan memperhatikan *baseline* pada tahun 2022 sebagai acuan dalam penentuan target tahun 2023. Penetapan ini selanjutnya akan menjadi dasar dalam penyusunan rencana aksi reformasi birokrasi general pada tahun 2023. Penetapan target utama RB general tercantum sebagai berikut.

Tabel 3.4. Target Kinerja RB general Pemerintah Kabupaten Katingan

Kegiatan Utama	Indikator	Baseline 2022	Target 2023	Perangkat daerah		
				Koordinator	Pelaksana	
SS.1.3	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE	Cukup	Cukup	Diskominfosantik	Perangkat Daerah
SS.1.4	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Nilai SAKIP	61,16% Kategori B	71,00 Kategori Sangat Baik (BB)	Bappedalitbang Inspektorat, Bagian Organisasi	Perangkat Daerah
SS.1.6	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat keberhasilan pembangunan ZI	-	Mengusulkan unit kerja memperoleh WBK	Inspektorat	Perangkat Daerah
	Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP	2,9	3	Inspektorat	Perangkat Daerah

	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat tindak lanjut pengeduan masyarakat (LAPOR)	9	7	Diskominfo	Perangkat Daerah
	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas (SPI)	69,49	70	Inspektorat	Perangkat Daerah
SS.1.7	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan	N/A	25%	Bagian Hukum	Perangkat Daerah
	Pelaksanaan Pembuatan Peraturan Perundangan-undangan	Indeks Reformasi Hukum	Kurang	Cukup	Bagian Hukum	Perangkat Daerah
SS.1.9	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Tingkat kualitas implementasi pengelolaan Barang dan Jasa	Cukup	Cukup	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Perangkat Daerah
SS.2.2	Penguatan Manajemen Talenta ASN	Tingkat implementasi manajemen talenta	Baik	Baik	BKPSDM	Perangkat Daerah
SS.2.4	Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	N/A	Baik	BKPSDM	Perangkat Daerah
	Pelaksanaan Core Values ASN	Nilai Survei Indeks BerAKHLAK	Mendapatkan nilai 56,7 % (cukup sehat dengan kategori B )	Target dengan kategori sehat 74 % (cukup sehat dengan kategori B )	Bagian Organisasi	Perangkat Daerah
	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Indeks Pelayanan Publik	B	B	Bagian Organisasi	Perangkat Daerah

Target kinerja RB general tabel 3.4 diatas belum seluruhnya mencakup seluruh sasaran strategis dan kegiatan utama sebagaimana tabel 3.3. Oleh karena itu, penentuan target kinerja RB general pada kegiatan utama yang belum memiliki baseline pada tahun 2022 akan ditetapkan beserta dengan dokumen rencana aksi yang disusun. Penetapan target kinerja juga memperhatikan pedoman dan petunjuk pelaksanaan pada RB level makro dan meso. Berikut indikator kinerja dari kegiatan utama yang belum memiliki *baseline* pada tahun 2022.

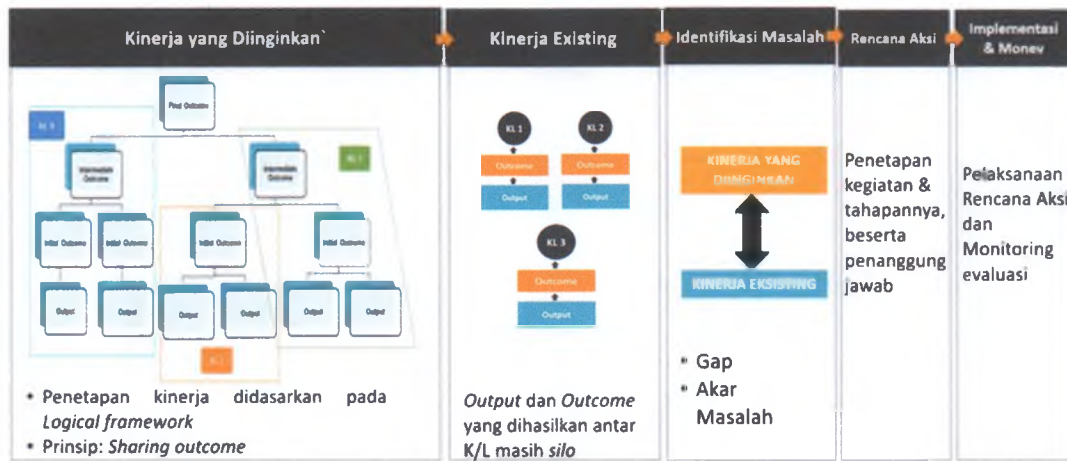
Tabel 3.5. Indikator kinerja RB General yang belum memiliki *baseline* pada tahun 2022

Kegiatan Utama		Indikator	Perangkat daerah	
			Koordinator	Pelaksana
SS.1.2	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat implementasi sistem kerja baru dan fleksibel bagi Pegawai ASN	Bagian Organisasi	Perangkat Daerah
SS.1.4	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Indeks Perencanaan pembangunan	Bappedalitbang	Perangkat Daerah
SS.1.5	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	Tingkat implementasi kebijakan transformasi digital MPP	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Perangkat Daerah
SS.1.8	Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat digitalisasi Arsip	Bagian Perpustakaan dan Arsip	Perangkat Daerah
	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat kualitas implementasi pengelolaan data statistik sektoral	Diskominfoantik	Perangkat Daerah
SS.1.7	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan	Bagian Hukum	Perangkat Daerah
SS.1.6	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	Inspektorat	Perangkat Daerah
SS.2.4	Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	BKPSDM	Perangkat Daerah

#### B) PENETAPAN TEMA DAN TARGET RB TEMATIK

RB Tematik dirumuskan untuk menjawab tuntutan percepatan dampak konkrit RB terhadap isu yang ada di hilir, yaitu capaian Pembangunan Nasional. Pelaksanaan RB Tematik tersebut tidak akan terwujud jika tidak diikuti dengan strategi dan pengelolaan yang tepat. Konsep RB Tematik juga merupakan upaya dan sarana untuk mengurai dan menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan (*debottlenecking*) yang memang dirasakan secara langsung oleh masyarakat dan menjadi penyebab tidak tercapainya tujuan dan sasaran dari RB Tematik yang telah ditetapkan.

Dengan teratasinya akar masalah dalam tata kelola tersebut maka diharapkan dapat mempercepat tercapainya tujuan dan sasaran kebijakan pembangunan serta terwujudnya kondisi yang diharapkan masyarakat. Berikut kerangka logis RB Tematik dapat dilihat pada Gambar 4.1. Sumber: Kementerian PANRB



Melalui RB Tematik, pemerintah daerah dapat lebih fokus dalam mempercepat terwujudnya kinerja yang telah ditentukan dengan menetapkan tema dalam RB Tematik. Tema dalam RB Tematik ditentukan oleh tingkat makro yakni penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi pemerintah, peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan pengendalian inflasi. Setiap pemerintah daerah dapat memilih tema di atas berdasarkan hasil analisis atas data yang ada.

Dari uraian data di atas maka pelaksanaan reformasi birokrasi tematik 2023-2024 yang dipilih adalah peningkatan penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, peningkatan digitalisasi berfokus pada penanganan stunting, inflasi dan peningkatan produk dalam negeri dari penetapan tema tersebut maka ditentukan pula target RB tematik sebagai berikut.

Tabel 3.5. Target RB Tematik Pemerintah Kabupaten Katingan

Tema	Sasaran Tematik	Indikator	Base line	Target 2023
Penanggulangan kemiskinan	Menurunnya angka kemiskinan	Angka kemiskinan	Angka Kemiskinan: 5,50% (2022)	4,95% (sesuai target RPJMD)
Peningkatan investasi	Meningkatnya investasi	Persentase peningkatan investasi (PMA & PMDN)	Pertumbuhan Investasi = 3,16	16,65%
Penanggulangan Stunting	Menurunnya angka stunting	Hasil survei status gizi Indonesia (SSGI)	29,9	20,29
Inflasi	Menurunnya tingkat Inflasi daerah	Tingkat Inflasi	5,5	5,00



	daerah			
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri	Realisasi PDN	N/A	

#### BAB IV MANAJEMEN PELAKSANAAN RB

##### A. PELAKSANAAN RB

Agar pelaksanaan RB dapat berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengelolaan yang baik pula. Untuk itu perlu dibentuk tim yang berperan dalam melakukan pengelolaan RB yang disebut Tim Pengelola Reformasi Birokrasi Kabupaten Katingan. Pembentukan tim ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati Katingan. Tim pengelola Reformasi Birokrasi merupakan tim efektif yang dibentuk untuk bekerja secara fokus dalam Pembangunan Reformasi Birokrasi. Keanggotaan Tim Pengelola Reformasi Birokrasi dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengarah I dan Pengarah II adalah Bupati dan Wakil Bupati.
2. Ketua adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan.
3. Koordinator Bidang Monitoring dan Evaluasi capaian hasil pelaksanaan RB Tematik maupun RB General adalah Inspektur Kabupaten Katingan.
4. Pelaksana RB General dan RB Tematik adalah FKPD dan perangkat daerah terkait.
5. Dalam tim tersebut terdiri dari Pengelola RB General dan RB Tematik yang dikoordinator oleh perangkat daerah yang bertanggungjawab pada sasaran Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Katingan

Tahap berikutnya dalam pelaksanaan RB yaitu menyusun rencana aksi. Rencana aksi adalah tahapan untuk mengoperasionalkan strategi dan program yang telah ditetapkan dalam *Road Map* RB. Rencana aksi minimal berisi:

- 1) Rincian kegiatan;
- 2) Indikator *output* dari rincian kegiatan;
- 3) Target;
- 4) Waktu pelaksanaan; serta
- 5) Penanggungjawab.

##### B. MEKANISME MONITORING DAN EVALUASI RB

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi perlu dilakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan seluruh tahapan pelaksanaan RB dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan masukan dalam setiap proses pelaksanaan. Oleh karena itu, monitoring dan evaluasi RB yang dilakukan untuk:

- 1) Memantau keberhasilan pelaksanaan RB dengan mengukur ketercapaian target pada indikator sasaran dan tujuan RB serta indikator lain yang terkait RB,
- 2) Menilai keberhasilan/ efektivitas rencana aksi,
- 3) Menilai kualitas pengelolaan RB internal. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi RB dilakukan secara berkala minimal setiap 6 (enam) bulan, yang dilakukan secara internal oleh evaluator internal pemerintah daerah.

Hasil dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi akan memberikan gambaran keberhasilan maupun ketidakberhasilan RB dan telah mengidentifikasi hal-hal yang perlu segera disempurnakan serta melakukan tindak lanjut perbaikan.

Tindak lanjut perbaikan selanjutnya menjadi bahan masukan bagi tim pengelola RB untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap rencana aksi.

## BAB V PENUTUP

Reformasi Birokrasi (RB) dilakukan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan berdaya saing dan mampu mendorong capaian pembangunan nasional, daya saing global dan peningkatan pelayanan publik, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktik KKN. Mengingat bahwa Reformasi Birokrasi (RB) termasuk ke dalam agenda prioritas nasional, maka melalui penajaman Reformasi Birokrasi (RB) yang dilakukan, hal tersebut dapat mendukung percepatan pembangunan nasional. Sehingga dengan strategi RB yang baru diharapkan juga dapat mendorong percepatan capaian sasaran strategis RB dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Dinamika lingkungan yang selalu berubah dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi juga memicu pelaksanaan RB untuk semakin adaptif dan lincah. Adanya penajaman Road Map RB pun bertujuan untuk menjawab hal tersebut dengan terfokus pada empat aspek, yaitu, penajaman tujuan dan sasaran, penajaman kegiatan utama yang fokus dan berdampak, fokus kepada isu hulu dan hilir dan penajaman indikator RB. Adapun aspek penajaman RB tersebut dapat membantu menciptakan kesuksesan RB yang merupakan tanggung jawab segenap elemen pemerintahan, sehingga kesadaran dan komitmen yang kuat harus dibangun bersama seluruh pemerintah daerah di Indonesia, sebagaimana yang diharapkan dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

Kendala Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Katingan adalah:

1. Adanya beberapa indikator yang masih belum pernah atau masih dalam proses evaluasi/ penilaian dari pusat;
2. Adanya persyaratan minimal capaian yang belum bisa terpenuhi sehingga terhambat dalam mencapai target capaian indikator.

Dari beberapa hambatan tersebut di atas pemerintah Kabupaten Katingan melalui perangkat daerah terkait berupaya dengan koordinasi dan konsultasi dengan pusat atau ke Kementerian terkait (level meso) dengan harapan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Katingan dapat maksimal dan meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi di tahun selanjutnya.

### KAMUS INDIKATOR

No.	Indikator Tujuan	Definisi Operasional
<i>Outcome</i>		
1	Indeks Reformasi Birokrasi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Definisi operasional: Indikator komposit yang menggambarkan hasil pelaksanaan RB. Indikator ini digunakan sebagai ukuran keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan RB. Penilaian dilakukan secara kolaboratif pada tingkat terimplementasinya kebijakan (<i>immediate outcomes</i>) oleh para instansi pengampu kebijakan dan capaian sasaran strategis yang merupakan <i>outcomes</i> dari implementasi kebijakan (<i>intermediate outcomes</i>).</li></ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instansi penanggungjawab pengukuran: Kementerian PANRB, yaitu Deputi RBKUNWAS selaku koordinator (UPRBN) dan kementerian/lembaga yang menjadi <i>leading institution</i> kebijakan RB pada tingkat meso.</li> <li>• Sumber data: Hasil penilaian implementasi kebijakan oleh <i>leading institution</i>, capaian target indikator kinerja utama organisasi dan kontribusinya pada indikator kinerja pembangunan serta Survei Eksternal dan Internal yaitu: Survei Penilaian Integritas (SPI), Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Survei ASN BerAKHLAK, Survei <i>Employer Branding</i> ASN.</li> </ul>
No.	Indikator Tujuan	Definisi Operasional

*Outcome*

1	Indeks Reformasi Birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Definisi operasional: Indikator komposit yang menggambarkan hasil pelaksanaan RB. Indikator ini digunakan sebagai ukuran keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan RB. Penilaian dilakukan secara kolaboratif pada tingkat terimplementasinya kebijakan (<i>immediate outcomes</i>) oleh para instansi pengampu kebijakan dan capaian sasaran strategis yang merupakan <i>outcomes</i> dari implementasi kebijakan (<i>intermediate outcomes</i>).</li> <li>• Instansi penanggungjawab pengukuran: Kementerian PANRB, yaitu Deputi RBKUNWAS selaku koordinator (UPRBN) dan kementerian/lembaga yang menjadi <i>leading institution</i> kebijakan RB pada tingkat meso.</li> <li>• Sumber data: Hasil penilaian implementasi kebijakan oleh <i>leading institution</i>, capaian target indikator kinerja utama organisasi dan kontribusinya pada indikator kinerja pembangunan serta Survei Eksternal dan Internal yaitu: Survei Penilaian Integritas (SPI), Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Survei ASN BerAKHLAK, Survei <i>Employer Branding</i> ASN.</li> </ul>
---	----------------------------	--

No.	Indikator Sasaran Strategis I	Definisi Operasional
1.	Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Definisi operasional: Indikator yang mengukur capaian penerapan SPBE pada pemerintah daerah dan tingkat nasional. Indikator ini digunakan sebagai salah satu ukuran keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan transformasi digital. Penilaian dilakukan terhadap tingkat kematangan implementasi pada 3 domain atau aspek, yaitu kebijakan, tata kelola, layanan internal dan layanan publik.</li> <li>• Instansi penanggungjawab pengukuran: Kementerian PANRB, yaitu Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sumber data: Hasil penilaian SPBE Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB.</li> </ul>
2.	Capaian Akuntabilitas Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Definisi operasional: Indikator yang mengukur tingkat capaian kinerja pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran yang merupakan hasil dari pelaksanaan kebijakan RB. Penilaian dilakukan terhadap dua hal, yaitu 1) kontribusi pemerintah daerah terhadap pencapaian kinerja sasaran pembangunan atau capaian Program Prioritas Nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP/D), dan 2) capaian indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pimpinan pemerintah daerah.</li> <li>• Instansi penanggungjawab pengukuran: Kementerian PANRB, yaitu Deputi Bidang RBKUNWAS untuk menilai capaian indikator kinerja utama pemerintah daerah, dan Kementerian PPN/Bappenas untuk menilai Capaian kontribusi. kementerian / lembaga terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional.</li> <li>• Sumber data: Hasil Monev RKP Kementerian PPN/Bappenas, Laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Deputi Bidang RBKUNWAS Kementerian PANRB, Laporan evaluasi LPPD Ditjen Otonomi Daerah, Laporan Capaian Indikator makro pembangunan BPS.</li> </ul>
3.	Capaian Akuntabilitas Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Definisi operasional: Indikator yang mengukur tingkat akuntabilitas keuangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan negara (APBN/APBD). Penilaian dilakukan terhadap dua hal yaitu : 1) tingkat opini BPK atas laporan keuangan terkait dengan kewajaran sistem pengendalian internal kepatuhan, dan 2) tingkat tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK untuk perbaikan yang berkelanjutan.</li> <li>• Instansi penanggungjawab pengukuran: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).</li> <li>• Sumber data: Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan pemerintah daerah dan Hasil Monev tindak lanjut rekomendasi BPK.</li> </ul>

No.	Indikator Sasaran Strategis II	Definisi Operasional
1.	Nilai <i>Employer Branding</i> ASN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Definisi operasional: Indikator yang mengukur tingkat kematangan implementasi <i>core value</i> ASN BerAKHLAK pada pemerintah daerah. Pengukuran dilakukan dengan survei kepada masyarakat yang menerima pelayanan.</li> <li>• Instansi penanggungjawab pengukuran: Kementerian PANRB, yaitu Deputi Bidang SDM Aparatur.</li> <li>• Sumber data: Hasil survei <i>employer branding</i></li> </ul>

2.	Indeks BerAKHLAK	<ul style="list-style-type: none"> <li>Definisi operasional: Indikator yang mengukur tingkat kematangan implementasi <i>core value</i> ASN BerAKHLAK. Pengukuran dilakukan dengan survei kepada internal ASN dalam mengimplementasikan Nilai BerAKHLAK ASN.</li> <li>Instansi penanggungjawab pengukuran: Kementerian PANRB, yaitu Deputi Bidang SDM Aparatur.</li> <li>Sumber data: Hasil survei BerAKHLAK ASN.</li> </ul>
3.	Nilai Survei Penilaian Integritas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Definisi operasional: Indikator yang mengukur tingkat integritas organisasi pada pemerintah daerah. Indikator ini digunakan sebagai salah satu ukuran keberhasilan pemerintah daerah dalam memetakan resiko korupsi dan upaya pencegahan korupsi. Penilaian dilakukan dengan melakukan survei kepada 3 kelompok responden utama, yaitu <i>stakeholder</i> yang dilayani, praktisi ahli, dan ASN internal.</li> <li>Instansi penanggungjawab pengukuran: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).</li> <li>Sumber data: Hasil SPI KPK.</li> </ul>
4.	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Definisi operasional: Indikator yang mengukur tingkat kepuasan masyarakat penerima layanan terhadap kualitas pelayanan dari pemerintah daerah. Penilaian dilakukan dengan melakukan survei eksternal kepada masyarakat penerima layanan.</li> <li>Instansi penanggungjawab pengukuran: Kementerian PANRB, yaitu Deputi Bidang Pelayanan Publik.</li> <li>Sumber data: Hasil SKM.</li> </ul>

No.	Indikator Kebijakan Percepatan Strategis I	Definisi Operasional
1.	Pemerintah daerah yang telah mengimplementasikan penyederhanaan birokrasi dengan baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>Definisi operasional: Indikator yang mengukur tingkat implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi oleh pemerintah daerah. Penilaian dilakukan dengan monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi oleh pemerintah daerah.</li> <li>Instansi penanggungjawab pengukuran: Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB serta Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri.</li> <li>Sumber data: Laporan hasil Monev.</li> </ul>
2.	Pemerintah daerah yang telah mengimplementasikan kebijakan sistem baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN dengan baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>Definisi operasional: Indikator yang mengukur tingkat implementasi sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN. Penilaian dilakukan dengan monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN oleh seluruh pemerintah daerah.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instansi penanggungjawab pengukuran: Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB.</li> <li>• Sumber data: Laporan Hasil Monev.</li> </ul>
3.	Tingkat implementasi inisiatif Strategi Arsitektur SPBE Nasional pada pemerintah daerah baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Definisi operasional: Indikator yang mengukur tingkat implementasi kebijakan Arsitektur SPBE Nasional. Penilaian dilakukan dengan monitoring dan evaluasi atas tingkat implementasi inisiatif strategis yang telah ditargetkan dalam Perpres sebagai pemerintah daerah penanggungjawab.</li> <li>• Instansi penanggungjawab pengukuran: Kementerian PANRB, yaitu Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB.</li> <li>• Sumber data: Laporan Hasil Monev.</li> </ul>
4.	Pemerintah daerah dengan Indeks Perencanaan Pembangunan Baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Definisi operasional: Indikator yang mengukur tingkat kualitas perencanaan pembangunan yang meliputi keselarasan perencanaan dan penganggaran, sinkronisasi dan integrasi program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan antar pemerintah daerah. Penilaian dilakukan dengan melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan perencanaan pembangunan pada pemerintah daerah.</li> <li>• Instansi penanggungjawab pengukuran: Kementerian Perencanaan Pembangunan/ Bappenas, dan Badan Pusat Statistik (BPS).</li> <li>• Sumber data: Laporan Hasil Monev, Laporan</li> </ul>
5.	Pemerintah daerah dengan Nilai SAKIP Baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Definisi operasional: Indikator yang mengukur tingkat kualitas implementasi manajemen kinerja organisasi guna mewujudkan budaya akuntabilitas kinerja organisasi yang baik dan dapat mampu mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran APBN/APBD pada pemerintah daerah. Penilaian dilakukan dengan melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan SAKIP pada pemerintah daerah.</li> <li>• Instansi penanggungjawab pengukuran: Kementerian PANRB, yaitu Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB.</li> <li>• Sumber data: Laporan Hasil Monev.</li> </ul>
6.	Kementerian/lembaga yang telah mengimplementasikan pelayanan publik digital	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Definisi operasional: Indikator yang mengukur tingkat implementasi kebijakan pelayanan publik digital oleh kementerian/lembaga. Penilaian dilakukan dengan monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan pelayanan publik digital pada kementerian/lembaga.</li> <li>• Instansi penanggungjawab pengukuran: Kementerian PANRB, yaitu Deputi Bidang Pelayanan Publik.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sumber data: Laporan hasil Monev.</li> </ul>
7.	Pemerintah daerah yang telah mengimplementasikan transformasi MPP digital	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Definisi operasional: Indikator yang mengukur tingkat implementasi kebijakan transformasi MPP digital oleh pemerintah daerah. Penilaian dilakukan dengan monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan MPP Digital pada pemerintah daerah.</li> <li>• Instansi penanggungjawab pengukuran: Kementerian PANRB, yaitu Deputi Bidang Pelayanan Publik.</li> <li>• Sumber data: Laporan hasil Monev .</li> </ul>
8.	Tingkat perolehan unit kerja yang mendapat predikat ZI per pemerintah daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Definisi operasional: Indikator yang mengukur tingkat implementasi pembangunan Zona Integritas Unit Kerja WBK/WBBM oleh pemerintah daerah. Penilaian dilakukan dengan evaluasi atas implementasi kebijakan ZI pada pemerintah daerah.</li> <li>• Instansi penanggungjawab pengukuran: Kementerian PANRB, yaitu Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan</li> <li>• Sumber data: Laporan hasil evaluasi</li> </ul>
9.	Tingkat maturitas SPIP pada pemerintah daerah baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Definisi operasional: Indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas implementasi sistem pengendalian internal instansi pemerintah pada pemerintah daerah. Pengukuran dilakukan melalui monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan SPIP pada pemerintah daerah.</li> <li>• Instansi penanggungjawab pengukuran: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).</li> <li>• Sumber data: Laporan Hasil evaluasi BPKP.</li> </ul>
10.	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) pada pemerintah daerah baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Definisi operasional: Indikator yang digunakan untuk mengukur tindak lanjut atas pengaduan masyarakat sebagai umpan balik perbaikan berkelanjutan pada pemerintah daerah.</li> <li>• Instansi penanggungjawab pengukuran: Kementerian PANRB yaitu Deputi Bidang Pelayanan Publik.</li> <li>• Sumber data: Laporan Hasil Monev Pengaduan LAPOR Kementerian PANRB.</li> </ul>
11.	Pemerintah daerah dengan tingkat kualitas kebijakan publik baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Definisi operasional: Indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas perumusan dan implementasi kebijakan publik pada pemerintah daerah.</li> <li>• Instansi penanggungjawab pengukuran: Lembaga Administrasi Negara.</li> <li>• Sumber data: Laporan Hasil evaluasi Lembaga Administrasi Negara.</li> </ul>
12.	Pemerintah daerah dengan indeks reformasi hukum baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Definisi operasional: Indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas dalam perumusan dan implementasi regulasi pada pemerintah daerah.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instansi penanggungjawab pengukuran: Kementerian Hukum dan HAM.</li> <li>• Sumber data: Laporan Hasil evaluasi Kementerian Hukum dan HAM.</li> </ul>
13.	Pemerintah daerah dengan tingkat kualitas pengelolaan arsip digital baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Definisi operasional: Indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas implementasi pengelolaan arsip digital di pemerintah daerah. Pengukuran dilakukan melalui monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan pengelolaan arsip digital pada pemerintah daerah.</li> <li>• Instansi penanggungjawab pengukuran: Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).</li> <li>• Sumber data: Laporan Hasil Monev ANRI</li> </ul>
14.	Pemerintah daerah yang telah menyelenggarakan data statistik sektoral dengan baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Definisi operasional: Indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas implementasi pengelolaan data statistik sektoral pada pemerintah daerah. Pengukuran dilakukan melalui monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan penyelenggaraan data statistik sektoral pada pemerintah daerah</li> <li>• Instansi penanggungjawab pengukuran: Badan Pusat Statistik (BPS).</li> <li>• Sumber data: Laporan Hasil evaluasi BPS.</li> </ul>
15.	Pemerintah daerah yang Tata Kelola Pengadaannya baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Definisi operasional: Indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas implementasi pengelolaan Barang dan Jasa pada pemerintah daerah. Pengukuran dilakukan melalui monitoring dan evaluasi atas kebijakan tata kelola pengadaan pada pemerintah daerah.</li> <li>• Instansi penanggungjawab pengukuran: Lembaga Kebijakan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).</li> <li>• Sumber data: Laporan Hasil evaluasi LKPP.</li> </ul>
16.	Kementerian/lembaga yang Kualitas Pengelolaan Anggaran baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Definisi operasional: Indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas implementasi pengelolaan anggaran pada kementerian /lembaga. Pengukuran dilakukan melalui monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan pengelolaan anggaran pada kementerian /lembaga.</li> <li>• Instansi penanggungjawab pengukuran: Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara, Kemenkeu</li> <li>• Sumber data: Laporan Hasil Evaluasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara, Kementerian Keuangan.</li> </ul>
17.	Kementerian/lembaga yang Pengelolaan Asetnya baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Definisi operasional: Indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas implementasi pengelolaan aset pada kementerian/lembaga. Pengukuran dilakukan melalui monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan pengelolaan aset pada kementerian /lembaga.</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instansi penanggungjawab pengukuran: Direktorat Jenderal Pengelolaan Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.</li> <li>• Sumber data: Laporan Hasil evaluasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.</li> </ul>
--	---

No.	Indikator Kebijakan Percepatan Strategis II	Definisi Operasional
1.	Pemerintah daerah yang telah mengimplementasikan Kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional dengan baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Definisi operasional: Indikator yang mengukur tingkat implementasi kebijakan transformasi jabatan fungsional oleh pemerintah daerah. Penilaian dilakukan dengan monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional pada pemerintah daerah.</li> <li>• Instansi penanggungjawab pengukuran: Kementerian PANRB, yaitu Deputi Bidang SDM Aparatur.</li> <li>• Sumber data: Laporan hasil Monev.</li> </ul>
2.	Pemerintah daerah yang telah mengimplementasikan Manajemen Talenta ASN dengan baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Definisi operasional: Indikator yang mengukur tingkat implementasi kebijakan manajemen talenta oleh pemerintah daerah. Penilaian dilakukan dengan monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan Manajemen Talenta ASN pada pemerintah daerah.</li> <li>• Instansi penanggungjawab pengukuran: Kementerian PANRB, yaitu Deputi Bidang SDM Aparatur.</li> <li>• Sumber data: Laporan hasil Monev.</li> </ul>
3.	Badan Diklat pemerintah daerah yang telah mengimplementasikan Kebijakan Sistem Pembelajaran Terintegrasi ASN dengan Baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Definisi operasional: Indikator yang mengukur tingkat implementasi kebijakan sistem pembelajaran terintegrasi ASN oleh Badan Diklat pemerintah daerah. Penilaian dilakukan dengan monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan Sistem Pembelajaran Terintegrasi ASN pada pemerintah daerah.</li> <li>• Instansi penanggungjawab pengukuran: Lembaga Administrasi Negara (LAN).</li> <li>• Sumber data: Laporan Hasil Monev.</li> </ul>
4.	Tingkat kepatuhan implementasi rekrutmen pegawai ASN sesuai kebijakan perencanaan dan pengadaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Definisi operasional: Indikator yang mengukur tingkat implementasi kebijakan rekrutmen pegawai ASN pada pemerintah daerah. Penilaian dilakukan dengan monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan rekrutmen pegawai ASN yang pelaksanaannya dilakukan dengan sistem tersentral oleh BKN dan sistem di internal pemerintah daerah.</li> <li>• Instansi penanggungjawab pengukuran: Kementerian PANRB, yaitu Deputi Bidang SDM Aparatur.</li> <li>• Sumber data: Laporan Hasil Monev.</li> </ul>

5.	Tingkat implementasi platform digital ekosistem pada pemerintah daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Definisi operasional: Indikator yang mengukur tingkat implementasi kebijakan platform digital ekosistem manajemen ASN pada pemerintah daerah.</li> <li>• Penilaian dilakukan dengan monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan Platform digital ekosistem manajemen ASN yang pelaksanaannya dilakukan dengan sistem tersentral oleh BKN dan sistem di internal pemerintah daerah.</li> <li>• Instansi penanggungjawab pengukuran: Kementerian PANRB, yaitu Deputi Bidang SDM Aparatur.</li> <li>• Sumber data: Laporan Hasil Monev.</li> </ul>
6.	Pemerintah daerah yang telah mengimplementasikan kebijakan pengelolaan kinerja pegawai ASN dengan baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Definisi operasional: Indikator yang mengukur tingkat kualitas implementasi kebijakan pengelolaan kinerja pegawai ASN pemerintah daerah. Penilaian dilakukan dengan monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan pengelolaan kinerja pegawai ASN pada pemerintah daerah.</li> <li>• Instansi penanggungjawab pengukuran: Kementerian PANRB, yaitu Deputi Bidang SDM Aparatur.</li> <li>• Sumber data: Laporan Hasil Monev.</li> </ul>
7.	Pemerintah Daerah dengan Indeks Sistem Merit Baik(Integrasi dengan Indeks Profesionalitas ASN dan Indeks NSPK)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Definisi operasional: Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kualitas implementasi sistem merit ASN pada pemerintah daerah. Penilaian dilakukan dengan monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan Sistem Merit pada pemerintah daerah.</li> <li>• Instansi penanggungjawab pengukuran Ap: Komisi aratur Sipil Negara (KASN) &amp; Badan Kepegawaian Negara (BKN).</li> <li>• Sumber data: Laporan Hasil Monev KASN dan Evaluasi BKN.</li> </ul>
8.	Pemerintah daerah dengan Indeks Pelayanan Publik Baik (Integrasi IPP dengan Tingkat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik oleh Ombusman RI)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Definisi operasional: Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kualitas implementasi kebijakan pelayanan publik pada pemerintah daerah. Penilaian dilakukan dengan monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan Indeks Pelayanan Publik Baik pada pemerintah daerah.</li> <li>• Instansi penanggungjawab pengukuran: Kementerian PANRB, yaitu Deputi Bidang Pelayanan Publik &amp; Ombusman RI.</li> <li>• Sumber data: Laporan Hasil Monev Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB dan Ombudsman RI.</li> </ul>


  
 BUPATI KATINGAN,  
 BAIRUL

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI KATINGAN  
NOMOR 7 TAHUN 2024  
TENTANG  
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2023-2024

Identifikasi Prioritas Kegiatan Utama RB General

No	Kegiatan Utama	Mandat RB General Nasional	Tingkat Keparahan	Waktu (Mendesak)	Skala Prioritas (Total Skor)
1	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan <i>agile</i>	10	7	10	27
2	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	10	7	8	25
3	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	10	7	8	25
4	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	10	8	7	25
5	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	10	7	9	26
6	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	10	7	7	24
7	Penguatan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	10	7	9	26
8	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	10	7	8	25
9	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	10	8	7	25
10	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	10	7	8	25
11	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan	10	7	8	25
12	Pelaksanaan Arsip Digital	10	7	8	25
13	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	10	7	7	24
14	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	10	8	7	25
15	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	10	7	8	25
16	Penataan Jabatan Fungsional	10	6	7	23
17	Penguatan Manajemen Talenta ASN	10	8	7	25
18	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	10	6	8	24
19	Penguatan Sistem Merit	10	8	8	26
20	Pelaksanaan <i>Core Values</i> ASN	10	8	9	27
21	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	10	7	9	26



LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI KATINGAN  
 NOMOR 7 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2023-2024

Target Kegiatan Utama RB General

No	Kegiatan Utama	Indikator KU	Baseline (2022)	Target Tahunan		Unit/Satuan Kerja Pelaksanaan	
				2023	2024	Kordinator	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan <i>agile</i>	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	93,57	93,57	93,57	Sekretariat Daerah Bagian Organisasi	Semua perangkat daerah
2	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	0	80	100	Sekretariat Daerah Bagian Organisasi	Semua perangkat daerah
3	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE	2,25 (cukup)	2,5 (cukup)	2,62 (baik)	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	Semua perangkat daerah
		Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	50%	57%	57%	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	Semua perangkat daerah
4	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Nilai SAKIP	B (61,16)	B (64)	B (67)	Sekretariat Daerah Bagian Organisasi, Inspektorat	Semua perangkat daerah
		Indeks Perencanaan Pembangunan	N/A	N/A	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Semua perangkat daerah
5	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	Tingkat Implementasi Kebijakan Transformasi Digital	N/A	N/A	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Semua perangkat daerah
6	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	N/A	N/A	-	Inspektorat	Semua perangkat daerah
7	Penguatan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Skor SPIP	2,9	3	3	Inspektorat	Semua perangkat daerah
8	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	9	7	7	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	Leading sector pelayanan publik
9	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas	69,49	70	75	Inspektorat	Semua perangkat daerah
10	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan	0%	25%	50%	Sekretariat Daerah Bagian Hukum	Semua perangkat daerah
11	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Reformasi Hukum	Kurang (40,65)	Cukup (45)	Cukup (50)	Sekretariat Daerah Bagian Hukum	Semua perangkat daerah
12	Pelaksanaan Arsip Digital	Nilai pengawasan kearsipan	Kurang	Cukup	Cukup	Sekretariat Daerah Bagian Perpustakaan dan Arsip	Semua perangkat daerah
	Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat digitalisasi Arsip	N/A	N/A	C	Sekretariat Daerah Bagian Perpustakaan dan Arsip	Semua perangkat daerah
13	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	N/A	1,8	3	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	Semua perangkat daerah
14	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa (PBJ)	Cukup (45)	Cukup (52)	Cukup (55)	Sekretariat Daerah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretariat Daerah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
15	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Capaian Akuntabilitas Keuangan	WTP	WTP	WTP	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan	Semua perangkat daerah
16	Penataan Jabatan Fungsional	Tingkat Penerapan Kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional	Baik	Baik	Baik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Semua perangkat daerah
17	Penguatan Manajemen Talenta ASN	Tingkat Implementasi Manajemen Talenta	Sedang	Sedang	Baik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Semua perangkat daerah

W

18	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Perangkat daerah yang telah mengimplementasikan kebijakan pengelolaan kinerja ASN dengan baik	Kurang	Sedang	Baik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Semua perangkat daerah
19	Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	N/A	0,7 (Baik)	0,8 (Baik)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Semua perangkat daerah
20	Pelaksanaan <i>Core Values</i> ASN	Indeks Berakhlak	B	B	A	Sekretariat Daerah Bagian Organisasi	Semua perangkat daerah
21	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	B	B	BB	Sekretariat Daerah Bagian Organisasi	Semua perangkat daerah

Ej. BUPATI KATINGAN,  
SAIPUL



Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General  
 Kabupaten Katingan Tahun 2023

Kegiatan Utama	Indikator KU	Target Tahunan	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksanaan	
				Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total		Kordinator	Pelaksana
Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/ transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	93,57	Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah	Kegiatan	Jumlah Kegiatan pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah		1			1	Rp35.000.000	Sekretariat Daerah Bagian Organisasi	Semua perangkat daerah
Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	80%	Menyusun Peraturan Bupati tentang sistem kerja	Dok	Jumlah Kebijakan yang mengatur sistem kerja				1	1	Rp18.000.000	Sekretariat Daerah Bagian Organisasi	Semua perangkat daerah
			Melakukan sosialisasi tentang sistem kerja	Kegiatan	Jumlah kegiatan Sosialisasi				1	1	Rp15.000.000	Sekretariat Daerah Bagian Organisasi	Semua perangkat daerah
Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE	2,5 (cukup)	Melaksanakan rapat rutin Tim Koordinasi SPBE	Kegiatan	Jumlah Rapat	1	1	1	1	4	Rp29.600.000	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	Semua perangkat daerah
	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	57%	Melaksanakan Implementasi Peta Rencana SPBE	Persentase	Persentase capaian implementasi peta rencana SPBE				57%	57%	Rp4.129.164.658	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	Semua perangkat daerah
Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Nilai SAKIP	B (64)	Pembinaan pengelolaan aplikasi Sistem Informasi Pengendalian Pelaporan Evaluasi Kinerja Katingan (SIPPEKAT) yang sudah dibangun	Kegiatan				1			Tanpa anggaran	Sekretariat Daerah Bagian Organisasi	Semua perangkat daerah
				Kegiatan	Jumlah kegiatan	1					Rp105.620.803	Sekretariat Daerah Bagian Organisasi, Bapedalitbang, Inspektorat	Semua perangkat daerah
Penguatan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Skor SPIP	3	Pelaksanaan Pembinaan dan Pengendalian SPIP perangkat daerah	Kegiatan	Jumlah Kegiatan				3	3	Rp20.000.000	Inspektorat	Semua perangkat daerah

J

Kegiatan Utama	Indikator KU	Target Tahunan	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksanaan	
				Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total		Kordinator	Pelaksana
Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	95%	Melaksanakan monitoring dan evaluasi ke 13 Kecamatan Kabupaten Katingan	Kegiatan	Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi			5	8	13	Rp23.100.000	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	Leading sector pelayanan publik
			Rapat koordinasi tim pengarah Prosedur Pengaduan Masyarakat	Kegiatan	Jumlah kegiatan rapat koordinasi				1	1	Rp22.220.000	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	Leading sector pelayanan publik
Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas	70%	Mereviu Manajemen ASN	Dokumen	Laporan hasil reviu Manajemen ASN			1		1	Rp10.000.000	Inspektorat	Semua perangkat daerah
			Melaksanakan Reviu SSH, ASB, SBU dan HPSK	Dokumen	Laporan hasil reviu		1			1	Rp20.000.000	Inspektorat	Semua perangkat daerah
			Mereviu dana hibah dan bansos	Dokumen	Laporan hasil reviu dana hibah dan bansos		1			1	Rp40.000.000	Inspektorat	Semua perangkat daerah
			Melaksanakan Reviu Tata kelola PBJ	Dokumen	LHR tata kelola PBJ	1	1	1	1	4	Rp20.000.000	Inspektorat	Semua perangkat daerah
			Sosialisasi pengendalian kecurangan, budaya anti korupsi, pengendalian gratifikasi, SPIP	Kegiatan	Terlaksananya Sosialisasi pengendalian kecurangan, budaya anti korupsi, pengendalian gratifikasi, SPIP			1		1		Inspektorat/Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Semua perangkat daerah
			Sosialisasi Pengendalian gratifikasi	Kegiatan	Terlaksananya Sosialisasi Pengendalian gratifikasi			2		2	Tanpa anggaran	Inspektorat/Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	Semua perangkat daerah
			Pelaporan Harta Kekayaan Pegawai Negeri Sipil	Persentase	Bukti hasil LHKPN	100				100	Tanpa anggaran	Inspektorat	Legislatif, ASN Pemda dan BUMD
			Penayangan SIRUP	Dokumen	Rekapitulasi penayangan SIRUP	1	1	1	1	4	Tanpa anggaran	Sekretariat Derah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Semua perangkat daerah
			Melaksanakan Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan	Dokumen	Rekapitulasi Hasil Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan	1	1	1	1	4	Tanpa anggaran	Sekretariat Derah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Semua perangkat daerah
			Merekap Paket PBJ Pemilihan penyedia PBJ dan Laporan Evaluasi PBJ	Dokumen	Rekapitulasi pemilihan penyedia PBJ dan Laporan Bulanan dan tabel evaluasu PBJ	1	1	1	1	4	Rp5.814.984	Sekretariat Derah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Semua perangkat daerah

W

Kegiatan Utama	Indikator KU	Target Tahunan	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksanaan	
				Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total		Kordinator	Pelaksana
			Pendampingan dan <i>advokasi</i>	Dokumen	Rekapitulasi pendampingan dan <i>advokasi</i>	1	1	1	1	4	Tanpa anggaran	Sekretariat Daerah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Semua perangkat daerah
Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan	25%	Perencanaan Kebijakan	Kegiatan	Agenda <i>setting</i> dan formulasi kebijakan			1		1	Tanpa anggaran	Sekretariat Daerah Bagian Hukum	Semua perangkat daerah
			Evaluasi Kemanfaatan Kebijakan	Kegiatan	Implementasi Kebijakan dan Evaluasi Kebijakan			1		1	Tanpa anggaran	Sekretariat Daerah Bagian Hukum	Semua perangkat daerah
Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan	Indeks Reformasi Hukum	53,65 %	Pelaksanaan harmonisasi regulasi dengan Kementerian Hukum dan HAM	Kegiatan	Tingkat kehadiran pimpinan tinggi dalam rapat pengharmonisan			1		1	Tanpa anggaran	Sekretariat Daerah Bagian Hukum	Semua perangkat daerah
			Pelaksanaan <i>re-regulasi/de-regulasi</i> peraturan perundang-undangan	Kegiatan	Tindak lanjut hasil evaluasi terhadap program pembentukan produk hukum daerah			1		1	Tanpa anggaran	Sekretariat Daerah Bagian Hukum	Semua perangkat daerah
			Penataan database peraturan perundang-undangan	Kegiatan	Terbangunnya JDIH yang terintegrasi dengan portal JDIHN			1		1	Tanpa anggaran	Sekretariat Daerah Bagian Hukum	Semua perangkat daerah
Pelaksanaan Arsip Digital	Nilai pengawasan kersipan	C	Menambah SDM jabatan fungsional Arsiparis	Orang	Jumlah SDM Fungsional Arsiparis yang diangkat		1			1	Tanpa anggaran	Sekretariat Daerah Bagian Perpustakaan dan Arsip	Semua perangkat daerah
			Menyusun rumusan kebijakan teknis kersipan (Perda/Perbup)	Dokumen	Jumlah kebijakan teknis yang mengatur Penyelenggaraan kersipan				2	2	Tanpa anggaran	Sekretariat Daerah Bagian Perpustakaan dan Arsip	Semua perangkat daerah
			Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM Kersipan	Orang	Jumlah SDM kersipan yang mengikuti Bimtek/Pelatihan			45	39	84	Rp76.051.370	Sekretariat Daerah Bagian Perpustakaan dan Arsip	Semua perangkat daerah
Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1,8	Melaksanakan Koordinasi dan konsultasi ke Pembina data dan Produsen Data dalam rangka pengumpulan data statistik sektoral	Kegiatan	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan			1	1	2	Tanpa anggaran	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	Semua perangkat daerah



Kegiatan Utama	Indikator KU	Target Tahunan	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksanaan	
				Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total		Kordinator	Pelaksana
Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa (PBJ)	52 (C)	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ	Orang	Jumlah peningkatan Peningkatan kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ	4	4	4		12	Rp94.746.488	Sekretariat Derah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretariat Derah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			Pemenuhan tingkat pematangan UKPB	Dokumen	Jumlah dokumen pemenuhan tingkat kematangan UKPB		1	1		2	Rp37.738.503	Sekretariat Derah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretariat Derah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			Monitoring penginputan SIRUP untuk belanja barang/jasa Kabupaten Katingan	Dokumen	Rekapitulasi monitoring penginputan SIRUP untuk belanja barang/jasa Kabupaten Katingan	3	3	3	3	12	Tanpa anggaran	Sekretariat Derah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Semua perangkat daerah
Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Capaian Akuntabilitas Keuangan	WTP	Rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban	Dokumen	Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban	7		5		12	Rp140.711.798	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan	Semua perangkat daerah
			Koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulan dan semesteran	Laporan	Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulan dan semesteran	8		4		12	Rp446.416.505	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan	
			Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/kota	Dokumen	Jumlah rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1		1		2	Rp315.436.828	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan	Semua perangkat daerah

Kegiatan Utama	Indikator KU	Target Tahunan	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksanaan	
				Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total		Kordinator	Pelaksana
			Koordinasi, sinkronisasi dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah	Dokumen	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan penyelesaian	1		1		2	Rp30.201.664	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan	Semua perangkat daerah
			Penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintahan daerah	Dokumen	Jumlah kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah	1				1	Rp298.874.705	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan	Semua perangkat daerah
			Pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah kabupten/kota	Dokumen	Terlaksananya pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban kabupaten/kota	130		20		150	Rp136.123.790	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan	Semua perangkat daerah
			Implementasi dan pemeliharaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah	Dokumen	Terlaksananya implementasi dan pemeliharaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah	1				1	Rp222.467.454	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan	Semua perangkat daerah
			Pembinaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah pemerintah kabupaten/kota	Orang	Terlaksananya pembinaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah pemerintah kabupaten/kota	120		30		150	Rp144.937.430	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan	Semua perangkat daerah
			Penyusunan standar harga	Dokumen	Jumlah standar harga yang disusun	23	15			38	Rp174.286.100	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan	Semua perangkat daerah
			Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah	Dokumen	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah	13	8	9	8	38	Rp337.607.906	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan	Semua perangkat daerah
			Inventarisasi Barang Milik Daerah	Laporan	Jumlah lapoaran hasil inventarisasi (LH) Barang Milik Daerah	1		1		2	Rp196.827.400	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan	Semua perangkat daerah

Kegiatan Utama	Indikator KU	Target Tahunan	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksanaan	
				Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total		Kordinator	Pelaksana
			Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah	Dokumen	Jumlah dokumen hasil optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah	5	3	3	4	15	Rp354.585.160	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan	Semua perangkat daerah
			Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah	30	15	15	16	76	Rp354.585.160	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan	Semua perangkat daerah
Penataan Jabatan Fungsional	Tingkat Penerapan Kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional	100	Pengangkatan Pejabat Administrasi yang disetarakan ke Jabatan Fungsional sesuai penetapan Kementerian Dalam Negeri, ataupun Pengangkatan dalam fungsional lainnya	Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan pengangkatan dalam jabatan fungsional sesuai dengan yang ditetapkan	1	1			2	Rp30.979.786	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Semua perangkat daerah
Penguatan Manajemen Talenta ASN	Tingkat Implementasi Manajemen Talenta Indeks (Indeks Profesionalitas ASN)	Sedang	Pengembangan karier didasarkan atas kesesuaian kualifikasi, kompetensi dan kinerja	Kegiatan	Terlaksananya Uji Kompetensi melalui Lembaga Penilai Kompetensi Terakreditasi (Asessment Center)	1				1	Rp100.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Semua perangkat daerah
			Pengembangan Potensi PNS melalui Pendidikan dan Pelatihan Penjurangan	Orang	Terlaksananya Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN), Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA), dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)					28	Rp839.985.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Semua perangkat daerah
			Pemetaan Kompetensi dan Potensi ASN berbentuk <i>Talent Pool</i>	Kegiatan	Terlaksananya kegiatan <i>Talent Pool</i>				1	1	Rp2.060.239.608	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Semua perangkat daerah

Kegiatan Utama	Indikator KU	Target Tahunan	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksanaan	
				Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total		Kordinator	Pelaksana
			Pengembangan Kompetensi PNS melalui Jalur Pendidikan	Orang	Diberikannya Tugas Belajar bagi PNS yang memenuhi ketentuan				100	100	Tanpa anggaran	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Semua perangkat daerah
Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Perangkat daerah yang telah mengimplementasikan kebijakan pengelolaan kinerja ASN dengan baik	Sedang	Penilaian Kinerja ASN Berbasis Elektronik	Kegiatan	Terlaksananya kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan Penerapan Sistem Informasi E-Kinerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan	1				1	Rp2.060.239.608	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Semua perangkat daerah
			Manajemen Disiplin Kehadiran ASN melalui penggunaan Aplikasi Berbasis Elektronik/ <i>Location Based Presence</i> (LBP) yang terkoneksi dengan SIMPEGNAS BKN	Kegiatan	Terlaksananya Sosialisasi Sistem Kepegawaian Nasional dan Pendampingan Penerapan Manajemen Kepegawaian serta Manajemen Presensi				1	1	Rp2.060.239.608	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Semua perangkat daerah
Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	0,7	Menilai secara Mandiri terhadap tingkat penerapan Sistem Merit dalam manajemen ASN	Kegiatan	Penerapan Sistem Merit dari KASN		1		1	2	Tanpa anggaran	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Semua perangkat daerah
			Perencanaan ASN sesuai dengan Anjab, ABK, Peta Jabatan dan Proyeksi Kebutuhan 5 Tahun	Dokumen	<i>Bezetting</i> dan Formasi Kepegawaian Kabupaten Katingan			1		1	Tanpa anggaran	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Semua perangkat daerah
			Terlaksananya Penilaian Implementasi NSPK Manajemen ASN Pemerintah Kabupaten Katingan	Kegiatan	Kegiatan Penilaian NSPK				1	1	Tanpa anggaran	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Semua perangkat daerah
			Pembangunan Aplikasi Portal Inovasi Berbasis WEB	Kegiatan	Layanan Administrasi ASN yang dikelola oleh BKPSDM terpusat dalam sebuah Aplikasi Komputer berbasis WEB	1					Tanpa anggaran	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Semua perangkat daerah

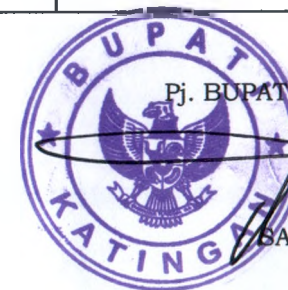
Kegiatan Utama	Indikator KU	Target Tahunan	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksanaan		
				Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total		Kordinator	Pelaksana	
			Pemanfaatan Sistem Informasi Kepegawaian Nasional (SIMPEGNAS)	Kegiatan	Layanan Kepegawaian dikelola secara terintegrasi dengan Sistem Informasi ASN BKN, yang mengukung konsep Satu Data Indonesia	1					1	Tanpa anggaran	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Semua perangkat daerah
			Penggunaan <i>Computer Assisted Test (CAT)</i> pada Rekrutmen ASN	Kegiatan	Terlaksananya Rekrutmen ASN yang Profesional, Transparan, Akuntabel serta terlepas dari unsur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme'	1			1	2	Rp319.649.730	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Semua perangkat daerah	
Pelaksanaan <i>Core Values</i> ASN	Indeks Berakhlak	B	Melaksanakan Sosialisasi Core Values ASN BerAKHLAK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan via zoom	Kegiatan	Terlaksananya kegiatan Sosialisasi <i>Core Values</i> ASN BerAKHLAK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan			1		1	Tanpa anggaran	Sekretariat Daerah Bagian Organisasi	Semua perangkat daerah	
			Menyusun kebijakan dan paduan teknis Budaya Kerja (Perbup)	Dokumen	Tersusunnya kebijakan dan paduan teknis Budaya Kerja (Perbup)		2			2	Rp2.000.000	Sekretariat Daerah Bagian Organisasi	Sekretariat Daerah Bagian Organisasi	
Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	85	Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik	Kegiatan	Jumlah Kegiatan				1	1	Rp2.000.000	Sekretariat Daerah Bagian Organisasi	Semua perangkat daerah	



LAMPIRAN V  
PERATURAN BUPATI KATINGAN  
NOMOR 7 TAHUN 2024  
TENTANG  
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2023-2024

Form Penetapan Tema RB Tematik

Tema	Sasaran Tematik	Indikator	Base line	Target	
			2022	2023	2024
Penanggulangan Kemiskinan	Menurunnya Angka Kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	5,50%	4,95%	4,95%
Peningkatan Investasi	Meningkatnya Jumlah Investasi (PMA & PMDN)	Realisasi Investasi	Rp224.713.310.000	Rp262.129.940.000	Rp262.129.940.000
Penanggulangan Stunting	Menurunnya Angka Stunting	Prevalensi Stunting Kabupaten Katingan Tahun 2023 20,29%	29,9	20,29	16,33
Inflasi	Menurunnya Tingkat Inflasi Daerah	Tingkat Inflasi	8.12	1,88	5,0
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri	Realisasi PDN	N/A	N/A	25%



Pj. BUPATI KATINGAN,

SAIFUL

LAMPIRAN VI  
PERATURAN BUPATI KATINGAN  
NOMOR 7 TAHUN 2024  
TENTANG  
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2023-2024

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik Tahun 2023

No	Target Tahunan	Kondisi Eksisting	Target	Kesesuaian Prioritas RPJMD	Keparahan Masalah	Dampak terhadap Kesejahteraan Masyarakat	Potensi yang dimiliki	Percepatan Kinerja	Nilai Total
				Skala 1-10 (1= Sangat tidak sesuai, 10= Sangat sesuai)					
1	Kemiskinan	5,50%	4,95%	10	6	9	8	8	41
2	Investasi	Rp224.713.310.000	Rp262.129.940.000	9	6	8	7	8	38
3	Penanganan Stunting	29,9	20,29	9	5	8	8	8	38
4	Inflasi	8,12	1,88%	8	6	8	7	6	35
5	PDN	N/A	N/A	-	-	-	-	-	-

Pj. BUPATI KATINGAN,  
BAIFUL



Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik  
Kabupaten Katingan Tahun 2023

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis kegiatan aksi (terkait atau tidak terkait langsung dengan masyarakat/stakholder utama)	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksanaan	
					Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW4	Total			Kordinator	Pelaksana
Tema Penanggulangan Kemiskinan															
Meningkatnya kemiskinan	Menurunnya angka kemiskinan	Persentase penduduk miskin	Tahun 2023 angka kemiskinan mengalami penurunan mejadi 4,95 %	Program Keluarga Harapan (PKH)	Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Jumlah KPM yang mendapat bantuan sosial PKH	9.531	9.537	9.550	9.556	9.556	Terkait langsung	Rp25.144.787.418 (APBN)	Dinas Sosial	Dinas Sosial
				Bantuan Pangan	Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Jumlah KPM yang mendapat bantuan sosial Pangan	12.750	13.200	13.300	13.400	13.400	Terkait langsung	Rp31.084.800.000 (APBN)	Dinas Sosial	Dinas Sosial
				Pengelolaan Data Pakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten	Persentase	Persentase desa yang aktif melakukan update data kesejahteraan sosial	60	63	66	70	70	Terkait langsung	Rp634.001.672 (APBD)	Dinas Sosial	Dinas Sosial
				Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Lokasi	Jumlah lokasi KAT yang diberdayakan		1	1		2	Terkait langsung	Rp20.000.000 (APBD)	Dinas Sosial	Dinas Sosial
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Pantii Sosial	Persentase	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar pantii	50	65	75	90	90	Terkait langsung	Rp614.302.754 (APBD)	Dinas Sosial	Dinas Sosial
				Pelatihan bagi IKM (Pelatihan Anyaman Rotan di Kecamatan Kamipang	Orang	Jumlah pengrajin yang mendapatkan pembinaan			10		10	Terkait langsung	Rp150.000.000	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
				Menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi di BLBK Kabupaten Katingan	Orang	Jumlah calon tenaga kerja mendapat pelatihan berbasis kompetensi			40		40	Terkait langsung	Rp119.954.780	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Balai Latihan Kerja Kabupaten Katingan
				Bantuan iuran Jaminan Kesehatan	Jumlah Peserta	Jumlah peserta PBPU dan BP Pemdada yang mendapatkan iuran Jaminan Kesehatan	94.335	94.335	94.335	94.335	377.340	Terkait langsung	Rp12.300.000.000	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
				Menyediakan Pelayanan Rumah Tunggu Persalinan	Rumah Tunggu Kelahiran/Persalinan (RTK)	Jumlah RTK	10	10	10	10	10	Terkait langsung	Rp200.000.000 (APBN)	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
				Penyediaan Makan Minum atau Konsumsi Ibu Hamil dan Pendamping Jampersal	Orang	Jumlah ibu hamil dan pendamping	1250	1250	1250	1250	5.000	Terkait langsung	Rp200.000.000 (APBN)	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan



Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis kegiatan aksi (terkait atau tidak terkait langsung dengan masyarakat/stakholder utama)	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksanaan		
					Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total			Kordinator	Pelaksana	
<b>Tema Investasi</b>																
Peningkatan iklim usaha dan realiasi nilai investasi	Meningkatnya Jumlah Investasi (PMA & PMDN)	Realisasi Investasi	Rp. 262.129.940.000 (target investasi dari Provinsi Kalteng tahun 2023)	Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis secara intensif terhadap Pelaku Usaha	Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis secara intensif terhadap Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha		204				204	Terkait	Rp169.743.520	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Melaksanakan Kegiatan Identifikasi, Penyelesaian dan Evaluasi permasalahan pelaku usaha	Terlaksananya kegiatan Identifikasi, Penyelesaian dan Evaluasi permasalahan pelaku usaha	Jumlah Kegiatan	3	3	1			7	Terkait	Rp87.080.975	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Melaksanakan Pengawasan penanaman modal sesuai dengan kewenangan Kabupaten	Terlaksananya kegiatan pengawasan penanaman modal sesuai dengan kewenangan Kabupaten	Jumlah Kegiatan		2	9	9		20	Tidak terkait	Rp212.675.505	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
<b>Tema Digitalisasi Administrasi Pemerintahan</b>																
Masih tingginya angka stunting di angka 29,9% dikategorikan tinggi	Menurunnya angka stunting	Prevalensi Stunting Kabupaten Katingan Tahun 2023 20,29%	Prevalensi Stunting Kabupaten Katingan Tahun 2023 20,29%	Mengoordinir aplikasi Bina Bangda dan Pemantauan capaian indikator strategi nasional penanganan stunting	Terlaksananya pemantauan atas hasil capaian indikator strategi nasional penanganan stunting	Jumlah Kegiatan	3	3	3	3		12	Terkait	Rp71.815.141	Bappedalitbang	Perangkat daerah terkait
				Melaksanakan perencanaan pengembangan aplikasi khusus sebagai basis data untuk penanganan stunting di Kab. Katingan	Kegiatan	Jumlah kegiatan			2	2		4	Terkait	Rp6.989.731	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian,	Perangkat daerah terkait, Desa, Kecamatan
				Pembuatan konten atau informasi pencegahan stunting dipublikasikan di media masa	Informasi	Jumlah informasi	16	15	16	17		64	Terkait	Tanpa anggaran	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
				Pembuatan kalender pencegahan stunting untuk daerah yang tidak terjangkau jaringan internet	Kalender	Jumlah kalender				703		703	Terkait	Rp50.000.000	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
				Mengoordinir aplikasi sistem gizi terpadu	Terpenuhinya data stunting	Jumlah Kegiatan	3	3	3	3		12	Terkait	Tanpa anggaran	Dinas Kesehatan	Perangkat daerah terkait

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis kegiatan aksi (terkait atau tidak terkait langsung dengan masyarakat/stakholder utama)	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksanaan		
					Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total			Kordinator	Pelaksana	
				Pendampingan orientasi TPK guna mendukung kegiatan sosiasasi aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Siap Hamil (Elsimil)	Terselenggaranya sosiasasi aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Siap Hamil (Elsimil)	Jumlah Kegiatan sosiasasi aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Siap Hamil (Elsimil)		13				13 Kegiatan	Terkait	Tanpa anggaran	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tema Inflasi																
Nilai Inflasi perlu diturunkan	Menurunnya tingkat Inflasi daerah	Tingkat Inflasi	Penurunan target pengendalian inflasi menjadi sebesar 1,88%	Perencanaan dan pelaksanaan penyusunan road map TPID 2022-2024	Dokumen	Jumlah dokumen	1	1	1	1	4	Terkait	Rp50.930.000	Sekretariat Daerah Bagian Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)	
				Menyelenggarakan Operasi Pasar menjelang Hari Raya Dharma Santi Tahun 2023, Hari Raya Besar Keagamaan Tahun 2023, Menjelang Hari Raya Idul Fitri Tahun 2023, BBGRM Tahun 2023, Pasar Murah Penanganan Dampak Inflasi dan Pasar Murah Menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru	Terselenggaranya Penyelenggaraan Operasi Pasar	Jumlah Operasi Pasar	2	3	20	9	34	Terkait	Rp290.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	
				Pembuatan konten mengenai upaya penurunan inflasi yang dilakukan oleh Pemerintah kabupaten Katingan	Konten	Jumlah konten	12	12	12	12	48	Terkait	Tanpa anggaran	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	
				Bantuan Langsung Tunai Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2023 untuk 1200 KPM	Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Jumlah KPM Penerima BLT Penanganan Dampak Inflasi			1.200		1.200	Terkait	Rp600.000.000	Dinas Sosial	Dinas Sosial	

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis kegiatan aksi (terkait atau tidak terkait langsung dengan masyarakat/stakholder utama)	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksanaan		
					Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total			Kordinator	Pelaksana	
				Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Ton	Tesedianya data cadangan pangan		7,538				7,538	Terkait	Rp81.860.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Tema Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Realisasi Penggunaa n Produk Dalam Negeri (PDN) perlu ditingkatkan	Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri	Realisasi PDN	Realisasi PDN sebesar	Promosi dan Pemasaran hal ini mengikuti Pameran Tk Daerah dan Nasional	Terlaksananya Promosi dan Pemasaran hal ini mengikuti Pameran Tk., Daerah dan Nasional	Jumlah UMKM yang dipromosi		1			1	Terkait	Rp86.078.319	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
				Pembuatan konten terkait peningkatan produk dalam negeri yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Katingan	Informasi	Jumlah informasi	3	-	-	10	13	Terkait	Tanpa anggaran	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
				Pembinaan (coaching clinic) kepada pelaku pengadaan barang jasa untuk peningkatan mutu/kualitas produk dalam negeri	Terlaksananya Sosialisasi dan Pendampingan kepada Pelaku Pengadaan Barang Jasa untuk peningkatan kualitas produk dalam negeri melalui E Katalog / Bela Pengadaan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan pendampingan	-	2			2	Terkait	Rp11.260.000	Sekretariat Derah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Semua perangkat daerah
				Mengkompilasi/menginpu t standar harga misalnya standar satuan harga (SSH) beras bulog yang mencantumkan persentase TKDN	terngkompilasi/ terimenginpu t standar harga misalnya standar satuan harga (SSH) beras bulog yang mencantumkan persentase TKDN	Jumlah Dokumen usulan SSH perangkat daerah yang mencantumkan persentase TKDN	5	5	5		15		Rp191.703.710	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Semua perangkat daerah
				Menyusun Perbup dan membuat dokumen perhitungan TKDN di lingkup Pemerintah Kabupaten Katingan	Tersusunnya kebijakan dan perhitungan TKDN	Jumlah Dokumen				1	1	Terkait	Rp200.000.000	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan



PJ. BUPATI KATINGAN,

SAIFUL